

**LAPORAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
MELALUI *SELF HELPING MODEL***

Pengusul :

Dr. Etty Puji Lestari

NIDN. 0016047403

Dr. Angelina Ika Rahutami

NIDN. 0622026802

Drs. Suhartono, M.Si

NIDN. 0023076301

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SELF HELPING MODEL

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. ETTY PUJI LESTARI S.E., M.Si.

NIDN : 0016047403

Jabatan Fungsional :

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Nomor HP : 08164260743

Surel (e-mail) : ettypl@ut.ac.id, simpen@ut.ac.id

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : ANGELINA IKA RAHUTAMI

NIDN : 0622026802

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : Drs. SUHARTONO M.Si.

NIDN : 0023076301

Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :

Alamat :

Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 60.000.000,00

Biaya Keseluruhan : Rp. 240.200.000,00



Tangerang, 27 - 11 - 2014,
Ketua Peneliti,

(Dr. ETTY PUJI LESTARI S.E., M.Si.)
NIP/NIK197404162002122001



RINGKASAN

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI *SELF HELPING MODEL*

Jumlah penduduk miskin merupakan masalah yang dihadapi semua provinsi di Indonesia tak terkecuali Kabupaten Bogor. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa penduduk miskin selalu meningkat, misalnya adanya gejolak dalam ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan mengurangi kemiskinan, dalam kenyataannya justru terkadang mengabaikan kaum miskin dan termarginalkan. Oleh karena itu, kebijakan pokok penanggulangan kemiskinan yang *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-growth* menjadi penting.

Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang menciptakan kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Salah satu tujuan utama dari pertumbuhan inklusif adalah pengurangan kemiskinan. Namun demikian, pengentasan kemiskinan yang bersifat parsial dan cenderung seragam sebenarnya menjadi permasalahan tersendiri dan kadang-kadang menciptakan ketergantungan. Salah satu cara terbaik untuk keluar dari jerat kemiskinan adalah adanya pemberdayaan diri sendiri, sehingga masyarakat miskin mampu menolong dirinya sendiri untuk keluar dari kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, dengan menggunakan metode analisis kuantitatif maupun kualitatif secara umum bertujuan mengembangkan model pemberdayaan diri sendiri atau *self-helping program* untuk keluar dari masalah kemiskinan pada kelompok masyarakat miskin produktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih banyak potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Banyak lahan yang tidak dipergunakan padahal pangsa pasar untuk produk-produk pertanian seperti singkong dan lengkuas sudah tercipta. Sementara itu dari sisi peternakan, peternakan kambing, sapi dan perikanan sangat mungkin dikembangkan karena

pangsa pasarnya sudah terbentuk. Oleh karena itu pelatihan yang berbasis keahlian dan inovasi sangat diperlukan agar mereka bisa memberdayakan diri sendiri.

Kata kunci: Penanggulangan Kemiskinan, *Self-Helping Model*, Miskin Produktif

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah termasuk Provinsi Kabupaten Bogor adalah masalah kemiskinan. Data BPS Provinsi Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada bulan September 2012 sebesar 366,77 ribu orang, meningkat 3,57 ribu dari bulan Maret pada tahun yang sama (BPS Provinsi Kabupaten Bogor, 2012). Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan prosentase penduduk miskin, namun dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Untuk menanggulangi kemiskinan maka arah kebijakan pokok penanggulan kemiskinan di Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui program *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-growth*. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan mengurangi kemiskinan, dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi justru terkadang mengabaikan kaum miskin dan termarjinalkan, sehingga menghasilkan peningkatan *inequality* (Ali dan Son, 2007). Peningkatan *inequality* dapat membawa implikasi berupa turunnya tingkat pengurangan kemiskinan, stabilitas politik dan sosial serta penurunan pertumbuhan itu sendiri.

Bila ketimpangan pembangunan terjadi maka hal ini tidak sejalan dengan konsep pertumbuhan inklusif. Menurut Ali (2007) sumber utama untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan pengurangan kemiskinan adalah adanya lapangan

pekerjaan yang produktif dan layak, jaminan sosial dan peningkatan kapabilitas kebutuhan dasar masyarakat. Untuk membuat pertumbuhan inklusif terwujud, upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan pola bantuan, atau pun pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan secara seragam. Pengurangan kemiskinan perlu melihat terlebih dahulu karakter dan pola-pola spesifik yang terjadi dalam masyarakat miskin, agar diperoleh model pengurangan kemiskinan yang komprehensif.

Permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Bogor meliputi: (1) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan; (2) masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat; (3) belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah; (4) belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih; serta (5) kurangnya kesolehan social masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.

Masih rendahnya tingkat pendidikan berkaitan dengan rendahnya akses, kualitas dan relevansi pendidikan. Hal ini disebabkan terutama oleh terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan, rendahnya profesionalisme guru dan distribusinya belum merata, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan yang berkualitas, belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan, serta belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, maka ke depan perlu dirancang berbagai program untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang mencakup upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dasar, peningkatan akses terhadap pendidikan menengah, peningkatan akses keaksaraan, dan peningkatan akses pendidikan agama serta pendidikan keagamaan.

Selanjutnya perlu juga diupayakan peningkatan pemerataan distribusi, kualifikasi akademik, dan profesionalisme guru, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan. Kemudian perlu dirancang juga upaya peningkatan manajemen dan tatakelola pendidikan meliputi upaya untuk meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga serta meningkatkan kemitraan publik dan swasta. Hal yang juga penting adalah mewujudkan pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, mewujudkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua.

Masih rendahnya tingkat kesehatan berkaitan dengan rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan rendahnya status kesehatan ibu dan anak, rendahnya status gizi masyarakat, serta tingginya angka kesakitan

dan kematian akibat penyakit. Hal demikian terjadi karena rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, rendahnya status gizi ibu hamil, terbatasnya sarana Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), pos bersalin desa (Polindes) dan unit transfusi darah, rendahnya cakupan dan kualitas imunisasi, masih rendahnya status gizi ibu hamil, masih rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, masih tingginya angka kesakitan terutama diare, asfiksia, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan, seperti rendahnya cakupan air bersih dan sanitasi, dan kondisi perumahan yang tidak sehat, serta belum optimalnya pemanfaatan posyandu di samping determinan sosial budaya lainnya.

Permasalahan rendahnya status gizi masyarakat antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor tingginya angka kemiskinan, rendahnya kesehatan lingkungan, melemahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya aksesibilitas pangan pada tingkat keluarga terutama pada keluarga miskin, tingginya penyakit infeksi, belum memadainya pola asuh ibu, dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit.

Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan adalah terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan, terbatasnya ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan, terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Merujuk pada permasalahan tersebut di atas, maka kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Upaya lainnya yang relevan adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, peningkatan survailans epidemiologi, peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan tatalaksana kasus, serta peningkatan kesehatan lingkungan. Dalam kaitan dengan tenaga kesehatan, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyediaan dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan persebaran SDM kesehatan. Selanjutnya perlu juga meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat. Upaya lainnya yang juga relevan adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah terlihat dari belum memadainya kondisi jaringan sarana dan prasarana jalan, transportasi, jaringan pengairan dan irigasi, jaringan listrik, serta jaringan telekomunikasi dan informatika. Penyebab utamanya adalah kurang tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana sehingga tidak dapat berfungsi optimal. Selanjutnya karena kelembagaan, sumberdaya manusia, dan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Pada saat ini banyak lembaga yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga menyulitkan koordinasi, sedangkan kualitas sumber daya manusia masih rendah. Sementara itu, terkait dengan pembiayaan, investasi sarana dan prasarana saat ini masih jauh dari kebutuhan investasi.

Permasalahan transportasi yang perlu dibenahi, di antaranya: terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana dan prasarana transportasi, sistem transportasi multimoda belum terintegrasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayah sehingga pelayanan transportasi kurang efisien dan efektif, pendanaan untuk pemeliharaan prasarana terbatas, penyediaan sarana dan prasarana transportasi belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Mencermati kondisi permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, peningkatan pendanaan untuk pemeliharaan sarana prasarana transportasi, pengembangan sistem transportasi multimoda yang terintegrasi, peningkatan keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi,

peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

Jaringan pengairan dan irigasi masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: keberlanjutan ketersediaan air menurun, degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tingginya alih fungsi lahan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan peresapan/penyimpanan air. Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana penampung air yang memadai. Selain itu, kualitas air yang ada semakin menurun akibat tingginya pencemaran air. Ketersediaan air tanah semakin terancam akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan, yang juga menimbulkan dampak seperti penurunan permukaan air tanah, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence), serta layanan air baku belum optimal dan merata.

Suplai air baku semakin berkurang akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air, seperti waduk, embung, dan situ. Selain itu, kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Hal tersebut tidak diikuti dengan pengembangan teknologi pengolahan dan penyediaan air baku yang efektif dan optimal. Rendahnya ketersediaan prasarana penyedia air baku di perdesaan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya

pengelolaan irigasi belum optimal. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi.

Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani masih rendah dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dilaksanakan program peningkatan ketersediaan dan kelestarian sumber daya air, peningkatan layanan prasarana air baku, peningkatan layanan jaringan irigasi, pengendalian bahaya banjir serta peningkatan partisipasi masyarakat petani dan kinerja kelembagaan pengelola irigasi.

Selanjutnya permasalahan lain yang dihadapi adalah aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana prasarananya yang belum memadai. Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: (1) belum memadainya perangkat peraturan; (2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; (3) belum optimalnya sistem perencanaan; serta (4) terbatasnya pendanaan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dengan dukungan prasarana-sarana

dasar, utilitas yang memadai, dan memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*), serta peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan maupun sarana prasarana dasar permukiman. Selain permasalahan tersebut, ada juga permasalahan yang cukup potensial yaitu kurangnya ketahanan energi terutama diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi dan terbatasnya penggunaan renewable energy dan energi yang bersih dan ekonomis, dan belum optimalnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan industri rumah tangga, industri besar maupun transportasi. Hal ini terjadi karena bauran energi (*energy mix*) belum optimal, pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik serta peran dan partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi masih kurang. Berkaitan dengan permasalahan tersebut kedepan perlu dirancang program untuk peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan, peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi, serta pengembangan penggunaan renewable energy dan energi yang bersih dan ekonomis.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam hal jaringan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika untuk kegiatan yang produktif sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat daya saing. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya: belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan layanan komunikasiinformatika, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana

broadband, belum optimalnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio, belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi dan informatika, masih terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi, rendahnya tingkat e-literasi aparatur pemerintah dan masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan sumber pembiayaan dalam penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi-informatika, serta meningkatnya cyber crime (misuse dan abuse pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi/TIK). Relevan dengan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika yang aman dan modern dengan kualitas baik dan harga terjangkau, peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan informasi, serta penggunaan TIK secara efektif dan bijak dalam seluruh aspek kehidupan.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah kemiskinan yang bersifat multi dimensional di Kabupaten Bogor tidak cukup diatasi dengan pemberian subsidi atau bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Salah satu cara terbaik untuk keluar dari jerat kemiskinan adalah adanya pemberdayaan diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pemberdayaan diri sendiri atau *self- helping model* untuk keluar dari masalah kemiskinan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahun. Tujuan khusus pada tahun pertama adalah:

1. Memetakan karakter kelompok masyarakat miskin
2. Mengidentifikasi kelompok miskin produktif.
3. Mengidentifikasi pengetahuan/kearifan lokal yang dapat dikembangkan.
4. Mengembangkan model *self-helping program* disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada yang tepat dan sesuai dengan potensi serta karakter positif, yang dimiliki oleh kelompok miskin produktif.

Tujuan khusus pada tahun kedua adalah:

1. Membuat *benchmark study* sebelum dilakukan implementasi
2. Melakukan implementasi model *self-helping program*
3. Mengevaluasi model

Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Model *self-helping program* yang diharapkan akan dapat diterapkan pada daerah/kelompok yang memiliki karakteristik yang sama dengan model yang dibangun.
2. Rekomendasi kepada pemerintah mengenai model pengentasan kemiskinan yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan.
3. Jurnal dan seminar yang merupakan sarana diseminasi pengetahuan kepada masyarakat luas.

1.4. Keunggulan Penelitian

Penelitian ini menjadi lebih unggul dibanding penelitian sebelumnya karena penelitian ini mencakup empat hal berikut:

1. Memasukkan unsur pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. Konsep pertumbuhan inklusif bertujuan untuk menjamin bahwa kesempatan ekonomi yang dihasilkan dari pertumbuhan tersedia bagi semua orang, termasuk kaum miskin.
2. Menggunakan *knowledge-based economy* (KBE) sebagai dasar dalam mendisain *self-helping program*. Konsep KBE menggunakan pengetahuan dan teknologi dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dimana manusia sebagai *human capital* dan teknologi memegang peran utama dalam pembangunan. Kearifan dan pengetahuan lokal juga menjadi dasar pengembangan model, sehingga karakter positif yang ada dalam masyarakat miskin mendapat tempat dan dikembangkan dalam model tersebut. Penggunaan konsep KBE ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, karena di dalamnya terdapat difusi pengetahuan, perbaikan kondisi *human capital*, dan mendorong perubahan organisasional (OECD, 1996).
3. Menggunakan model *self-helping program* yang diharapkan akan semakin menguatkan karakter positif yang dimiliki oleh masyarakat miskin produktif, dan mengurangi perilaku yang cenderung mengharap bantuan dalam bentuk *cash transfer*.

4. Menggunakan pendekatan ekonomi, sosio-kultural. Analisis sosio-kultural digunakan untuk mendorong pembangunan agar memiliki dampak positif terhadap masyarakat miskin tidak saja dari sisi ekonomi namun juga dari sisi sosial dan budaya. Analisis sosial juga membuat penelitian ini mampu mendefinisikan dan mengetahui karakter kelompok miskin produktif yang berbeda. Analisis ini juga mampu untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan kelompok miskin produktif tidak mampu untuk mengakses atau menggunakan sumberdaya secara efektif. Secara sederhana, penggunaan analisis sosio-kultural diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi masyarakat miskin produktif, kesiapan mereka dalam mengadopsi ataupun melakukan perubahan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena secara keseluruhan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya melalui perluasan kesempatan yang sama bagi semua orang terutama kaum miskin dan termajinalkan. Kesempatan bagi kaum miskin dan termajinalkan dalam menikmati hasil pembangunan akan semakin luas dengan peningkatan kapasitas diri, yakni melalui metode pemberdayaan yang merangsang kaum miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan melalui gerakan mermbantu diri sendiri. Secara terperinci, manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi kaum miskin dan termajinalkan: Meningkatkan akses terhadap hasil-hasil pembangunan. Karena model yang akan dikembangkan adalah model

pemberdayaan yang unsur pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. Konsep pertumbuhan inklusif bertujuan untuk menjamin bahwa kesempatan ekonomi yang dihasilkan dari pertumbuhan tersedia bagi semua orang, termasuk kaum miskin.

2. Bagi Pemerintah: Sebagai masukan untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang memerlukan penghapusan rintangan institusi formal dan informal dalam melakukan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka baik secara individual maupun kolektif dan untuk mengurangi keterbatasan pilihan mereka. Pemberdayaan juga merupakan perluasan dari aset dan kapabilitas dari masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, mengontrol akuntabilitas institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka.
3. Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini akan memberikan pengayaan dalam hal referensi terutama yang terkait dengan implementasi pertumbuhan inklusif maupun *Knowledge Based Economy*

BAB II

STUDI PUSTAKA DAN ROADMAP PENELITIAN

2.1. Kemiskinan dalam Perspektif Teori

Pengertian umum mengenai kemiskinan adalah mengacu pada suatu kondisi dimana terdapat ketidakmampuan atau ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan, bahkan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan literatur, terdapat beberapa pengertian mengenai kemiskinan antara lain:

1. Kemiskinan absolut; kemiskinan yang mengacu pada kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, penduduk miskin adalah mereka yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan. Ukuran umum yang biasa digunakan antara lain menurut Bank Dunia, yakni US\$ 1 per hari dan US\$2 per hari.
2. Kemiskinan relatif; yakni kemiskinan yang mengacu pada kondisi distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan demikian, orang miskin selalu hadir dalam kehidupan
3. Kemiskinan struktural; merupakan kemiskinan yang disebabkan karena struktur ataupun tata kehidupan masyarakat
4. Kemiskinan budaya, adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya.

Mengacu pada beberapa jenis kemiskinan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan bukan merupakan masalah ekonomi saja, namun merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks, multidimensional.

Masalah kemiskinan menjadi sangat penting sifat-sifatnya. Sifat-sifat kemiskinan dapat merusak sistem serta tatanan ekonomi, politik, sosial budaya masyarakat bahkan dapat merusak nilai-nilai yang luhur yang ada dalam masyarakat. Begitu pentingnya masalah kemiskinan ini dalam tatanan kehidupan secara global sehingga ditempatkan sebagai sasaran pertama dalam *Millenium Development Goals* (MDGs).

Kemiskinan adalah bukan hal yang baru. Sudah sejak lama pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, menekan angka kemiskinan. Pada semua rezim pemerintahan telah menempatkan masalah kemiskinan sebagai prioritas. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, dengan disponsori oleh Bank Dunia disusun program di tingkat kecamatan dan *urban poor*, Kredit Usaha Tani (KUT), hingga kini dengan beras miskin (Raskin), jaring pengaman sosial (JPS), kartu gakin (keluarga miskin), pendidikan bagi siswa miskin, KUR, P2KP, Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM dan lain sebagainya.

Bukan karena pemerintah gagal, namun karena berbagai hal angka kemiskinan seolah tidak berubah. Satu hal yang bisa dicermati dalam program-program pengentasan kemiskinan adalah bahwa program tersebut merupakan inisiatif pemerintah, dengan subsidi penuh dari Pemerintah. Pendekatan demikian cenderung menempatkan “si miskin” sebagai obyek. Terdapat beberapa hal yang

kurang tepat dalam program penanggulangan kemiskinan (Abu Huraerah, 2006), (1) cenderung berorientasi pada aspek ekonomi, belum multidimensional, (2) bernuansa karitatif (kemurahan hati) dan bukan produktivitas, (3) menempatkan rakyat miskin sebagai objek bukan, subjek, (4) posisi pemerintah lebih sebagai penguasa daripada fasilitator. Suharto (2003) menyatakan perlunya paradigma baru dalam pengentasan kemiskinan, yakni menekankan “apa yang dimiliki orang miskin” bukan “apa yang tidak dimiliki orang miskin”. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus bersifat multidimensional, mendorong produktivitas, melibatkan kelompok miskin sebagai subyek dalam seluruh rangkaian program dan memberdayakan. Dengan demikian, kelompok ini diharapkan mampu membantu dirinya sendiri dari belenggu kemiskinan.

2.2. Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering ditetapkan sebagai tujuan suatu perekonomian. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut kadang mengabaikan masalah distribusi pendapatan yang ada dalam masyarakat. Kesenjangan pendapatan dalam masyarakat menjadi semakin lebar. Sebagai akibatnya, terdapat sekelompok masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan dan timbul kemiskinan. Menyadari hal tersebut, maka dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hendaklah tetap memperhatikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kemiskinan merupakan hal yang tak terpisahkan.

Inclusive growth/growth for all (pertumbuhan inklusif), merupakan konsep pertumbuhan yang mengacu pada suatu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dimana peluang ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati atau terdistribusi ke semua lapisan masyarakat, termasuk kaum miskin dan termarginalkan, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan demikian terdapat dua hal pokok dalam pertumbuhan inklusif, (1) Inklusi (penyertaan), yang berarti terdapat adanya difusi peluang bagi semua, yang berarti juga memberikan peluang ekonomi kepada mereka yang dalam pertumbuhan saat ini tersingkirkan, (2) pertumbuhan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa proses tidak akan berhenti pada saat ini tetapi juga pada masa yang akan datang.

Pertumbuhan inklusif merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pengurangan kemiskinan yang didasarkan hanya pada satu kriteria dan kriteria pendapatan absolut akan mengabaikan isu ketimpangan dan risiko terkait, namun sebaliknya dengan strategi pertumbuhan inklusif. Strategi pertumbuhan inklusif fokus pada penciptaan kesempatan dan penjaminan akses yang setara. Akses yang setara terhadap kesempatan akan menjadi dasar yang meningkatkan kapasitas manusia termasuk masyarakat miskin, yang memiliki aset utama tenaga kerja. Secara umum pertumbuhan inklusif fokus pada proses peningkatan kesempatan akan mengurangi kemiskinan secara efektif, dan biasanya akan memperhatikan masalah ketimpangan.

2.3. *Knowlegde Based Economy*

Tatanan ekonomi maupun sosial saat ini telah mengalami perubahan yang sangat radikal. Hal tersebut didorong oleh berkembangnya teknologi dan komunikasi serta globalisasi. Secara khusus terkait dengan tata ekonomi, perekonomian lama yang cenderung *resource based* yakni perekonomian yang mengandalkan kekayaan dan keragaman sumber daya alam diganti dengan perekonomian baru yakni *knowledge based economy (KBE)* perekonomian yang berbasis pada ilmu pengetahuan yang jugasering disebut dengan *digital economy*. Dalam KBE tersirat adanya pengakuan bahwa manusia sebagai sumberdaya dan teknologi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang dominan.

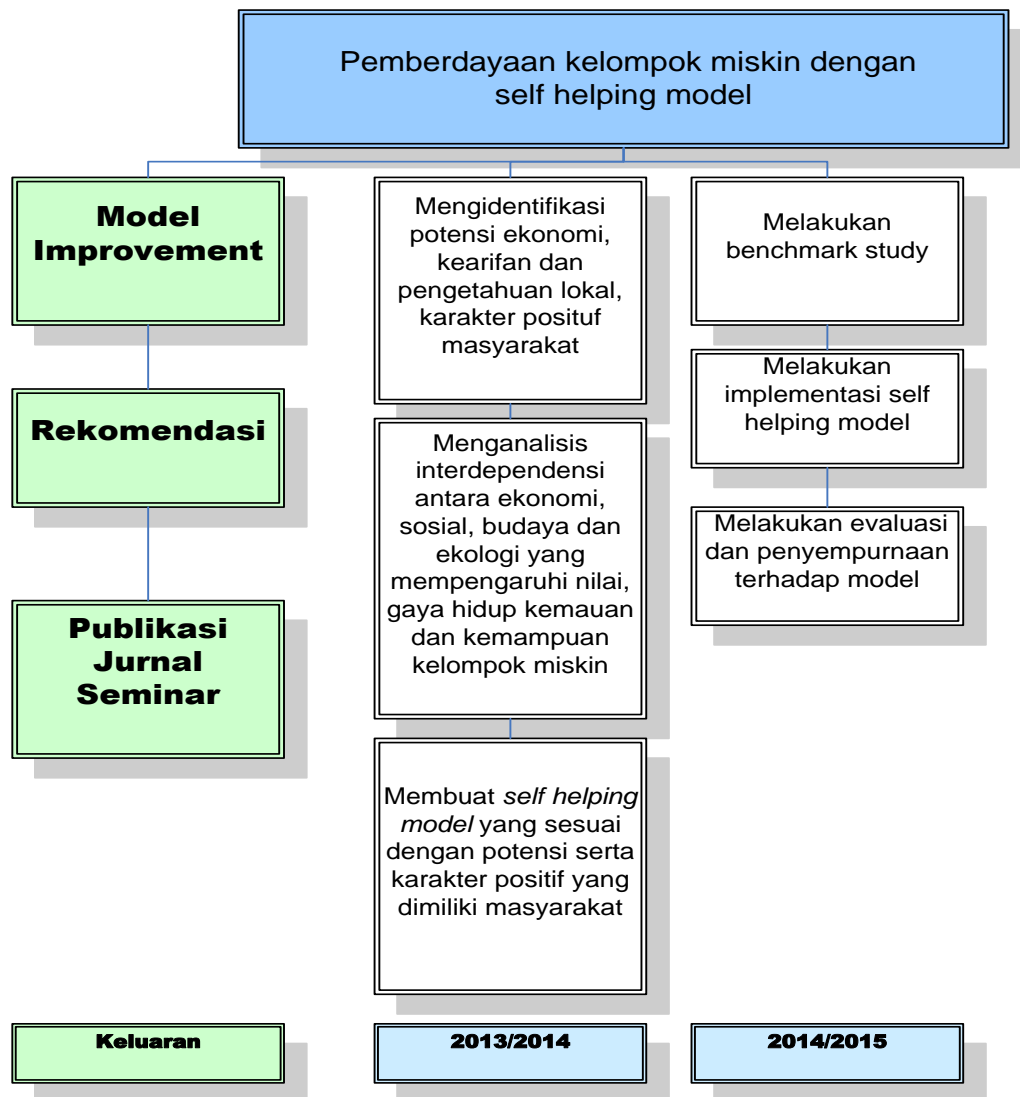
Peran KBE terhadap pertumbuhan ekonomi tercermin dalam tren perekonomian OECD yang menunjukkan adanya keterkaitan antara investasi yang *high-technology, high technology industry, highly skill labor* serta produktivitas (OECD, 1996). Karena berbasis pada ilmu pengetahuan, KBE memungkinkan organisasi dan masyarakat memperoleh, berkreasi, diseminasi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan secara lebih efektif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Peran ilmu pengetahuan dalam pembangunan ekonomi antara lain melalui (1) Pengetahuan Produksi (*knowledge production*), yakni mengembangkan dan menyediakan pengetahuan baru terkait dengan produksi/sistem produksi, (2) *knowledge transmission*, yakni melakukan edukasi dan pengembangan sumberdaya manusia dan (3) *knowledge transfer*, menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta penyelesaian masalah.

Seiring dengan perkembangan KBE, pemodelan dalam teori ekonomi juga mengalami penyesuaian. Sebagai contoh, mengenai fungsi produksi diakui bahwa investasi ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung pada produksi melalui peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk maupun proses produksi. Dalam teori terdahulu ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai faktor eksternal dalam produksi. Hal tersebut terjadi karena investasi pada ilmu pengetahuan tidak berlaku hukum *diminishing marginal return*. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dikatakan bahwa, ilmu pengetahuan dapat meningkatkan *returns on investment* (ROI) melalui metode produksi yang lebih efisien. Secara agregat, hal tersebut meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan, baik secara individual maupun kelembagaan menjadi sangat penting dan strategis dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam perekonomian, baik masalah pengangguran, kemiskinan, ketersediaan barang dan jasa dalam perekonomian, keterbatasan kapasitas produksi dan lain sebagainya.

2.4. Roadmap Penelitian

Penelitian ini disusun untuk jangka waktu dua tahun. Pada tahun pertama akan dilakukan identifikasi potensi ekonomi, kearifan lokal dan karakter positif masyarakat. Selanjutnya dilakukan kajian interdependensi antara budaya, ekologi, ekonomi yang berpengaruh terhadap kemampuan dan kemauan penduduk miskin sehingga bisa dibuatkan program yang sesuai. Setelah dilakukan dua kegiatan

diatas maka dibuat didesain self helping model yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada di masyarakat miskin.



Gambar 2.1. Roadmap Penelitian

Pada tahun kedua diberikan *benchmarking* pada model untuk memperkuat implementasi uji coba model. Model kemudian diimplementasikan pada masyarakat. Pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi terhadap model tersebut,

dan akan melakukan penyempurnaan model apabila masih ditemukan kelemahan pada model tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Penelitian Tahap 1 (Tahun 1)

3.1.1. Jenis Penelitian.

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian eksploratif dengan bertujuan untuk memetakan karakter kelompok miskin secara multidimensional seperti halnya sifat kemiskinan. Karakter utama yang digali adalah potensi, yakni segala sesuatu yang bersifat positif yang dimiliki oleh kelompok miskin sebagai dasar pengembangan model yang memberdayakan kelompok itu sendiri. Dikatakan multi dimensional karena dalam penelitian ini akan dieksplor sifat karakter positif, potensi ekonomi, kearifan maupun pengetahuan lokal atau meliputi aspek ekonomi, sosio-kultural dan ekologi.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor khususnya di kecamatan Ciseeng dan Parung Panjang dan difokuskan pada daerah-daerah yang merupakan kantong kemiskinan. Dalam penelitian ini akan diambil dua daerah dengan indeks keparahan kemiskinan tertinggi namun didukung oleh potensi daerah yang tinggi.

Mengenai persoalan pengentasan kemiskinan, tidak cukup hanya melihat jumlah penduduk miskinnya saja, namun juga harus dilihat bagaimana kondisi tingkat kedalaman kemiskinan/*poverty gap index* (P_1) maupun indeks keparahan kemiskinan/*distributionally sensitive* (P_2). Kedua indeks tersebut menjadi penting

karena P_1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini berarti kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin buruk. Sementara itu, P_2 menunjukkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri. Peningkatan pada P_1 berarti terjadi peningkatan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan hal tersebut berarti kehidupan masyarakat miskin pada tahun tersebut semakin terpuruk. Atas dasar hal tersebut, dalam penelitian ini akan diambil sampel di beberapa kotamadya di wilayah Kabupaten Bogor.

3.1.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian dengan baik, dalam penelitian ini digunakan baik data primer dan sekunder. Data primer meliputi karakter positif, potensi ekonomi, kultur (adat istiadat), harapan, kearifan dan pengetahuan lokal serta peran pemerintah. Sumber utama dari data primer adalah kelompok miskin sasaran. Sementara itu data sekunder meliputi: data-data terkait dengan kemiskinan seperti perkembangan kemiskinan, indeks kadalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan serta berbagai program dan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Guna memperoleh data-data dimaksud, beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

- a. **Teknik dokumentasi**, metode ini digunakan untuk memetakan kondisi kemiskinan saat ini, proyeksi serta mengidentifikasi berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah.
- b. **Wawancara (*face to face interview*)**, digunakan untuk melakukan menggali data primer dari kelompok sasaran yakni karakter positif, potensi ekonomi, kultur (adat istiadat), harapan, kearifan dan penegetahuan lokal serta harapan-harapan mereka. Dalam wawancara akan digunakan instrumen panduan wawancara yang terstruktur agar mudah disampaikan dan dipahami oleh responden. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan karakter responden yang mungkin tidak berpendidikan.
- c. ***Focus Group Discussion*(FGD)**. FGD akan bertujuan untuk melakukan penyelarasan berbagai pendapat dari berbagai pihak yang terkait dalam upaya pengentasan kemiskian seperti tokoh masyarakat, akadimisi dan pemerintah.

3.1.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan, utamanya adalah kelompok miskin produktif. Sedangkan sampel dalam penelitian ini akan diambil untuk masing masing Kabupaten dua kelompok sampel, dimana kelompok sasaran akan ditentukan teknik *convenience sampling*.

3.1.5. Teknik Analisis.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode atau teknik analisis kuantitatif dan kualitatif dengan deskriptif model. Sedangkan tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Melakukan studi pendahuluan peta kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Tahapan ini sebagai tahap awal untuk memetakan kondisi karakter dan potensi kelompok miskin. Tahapan ini dilakukan dengan studi literatur/dokumentasi dan studi lapangan untuk memperoleh pemahaman mengenai karakter kelompok miskin di Kabupaten Bogor.

Mengidentifikasi karakter positif, potensi ekonomi, kearifan dan pengetahuan lokal kelompok masyarakat miskin produktif

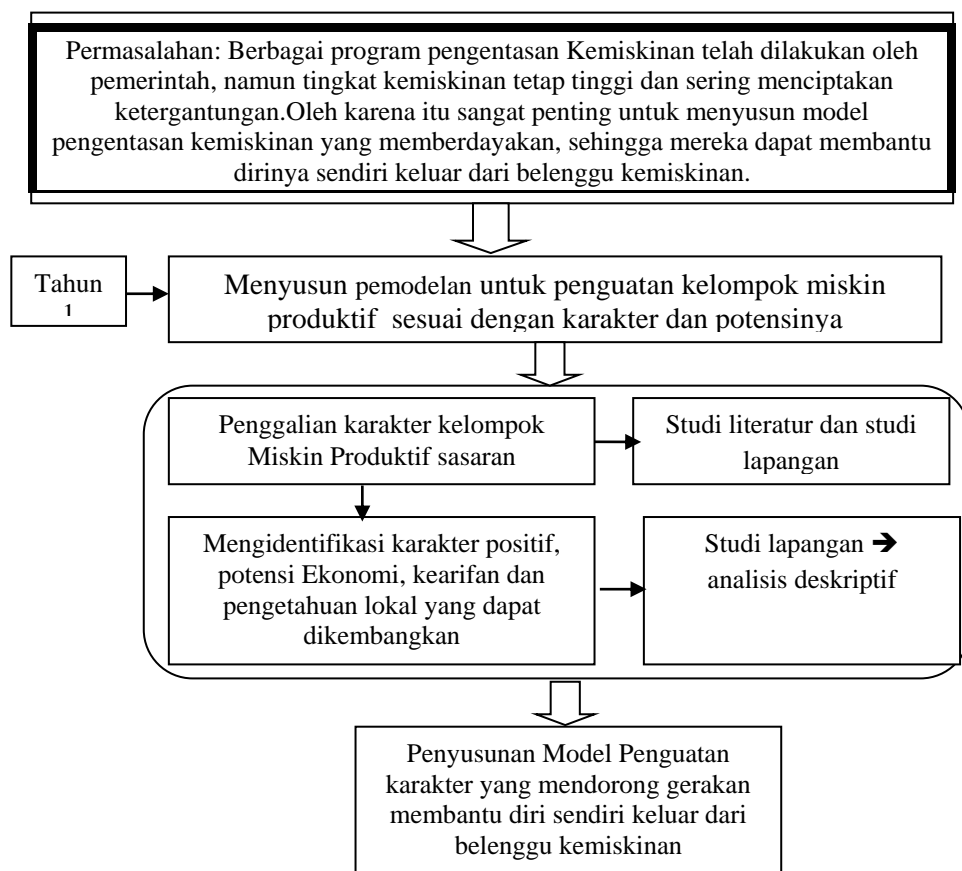
Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara personal pihak-pihak terkait untuk memahami dan mengidentifikasi karakter positif dan segala sesuai yang dimiliki oleh kelompok miskin produktif sebagai basis pemodelan pengentasan kemiskinan yang memberdayakan. Dalam melakukan identifikasi ini akan digunakan teknik *face to face interview* dengan pantauan pertanyaan yang sederhana agar mudah dipahami karena responden adalah kelompok miskin yang kecenderungannya tingkat pendidikan rendah.

Pengembangan model

Dengan basis hasil studi lapangan, dengan dukungan teori baik dari sisi psikologi sosial maupun ekonomi dikembangkan model pemberdayaan

masyarakat miskin, dimana model yang dikembangkan adalah model yang diharapkan mampu mendorong masyarakat itu sendiri dengan kekuatan mereka sendiri yakni berbasis dari apa yang mereka miliki berupaya keluar dari belenggu kemiskinan Pengembangan model dilakukan pengembangan pola pemberdayaan yang disesuaikan dengan hasil studi lapangan. Selanjutnya pola ini dikonfirmasi ke berbagai pihak/stakeholder yang kompeten untuk memantapkan model yang akan dikembangkan melalui *Focus Group discussion* (FGD)

3.1.6. Kerangka Pikir Penelitian Tahap 1



Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian Tahun 1

Tahap 2 (Tahun 2)

Desain penelitian dalam tahun kedua menggunakan desain penelitian eksperimen yang akan dilakukan dengan metode simulasi, sebagai upaya untuk mengimplementasikan alternatif model, melakukan evaluasi serta penyempurnaan model. Lokasi penelitian pada penelitian tahap 2 atau tahun ke 2 ini sama dengan lokasi penelitian tahap 1 atau tahun 1. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor yang difokuskan pada daerah-daerah yang merupakan kantong kemiskinan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi atas implementasi model sebagai proses untuk melakukan konfirmasi melalui simulasi.

Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan, utamanya adalah kelompok miskin produktif. Sampel dalam penelitian ini akan diambil untuk masing masing daerah dua kelompok sampel, dimana kelompok sasaran akan ditentukan teknik *convenience sampling*.

1. Teknik Analisis.

Dalam penelitian tahap ini akan dilakukan implementasi model, mengevaluasi dan menyempurnakan model. Dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan deskriptif model dan komparasi, analisis data akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Melakukan benchmark study.

Sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan ini ditetapkan seperti pada penelitian tahap 1 dan diberikan benchmark study sebelum implementasi model.

b. Mengimplentasikan Model

Pada tahapan ini, model pemberdayaan kelompok miskin akan diimplementasikan. Seiring dengan implementasi model, akan selalu diobservasi mengenai perkembangan kelompok sasaran, terutama terkait dengan pola pikir atau cara pandang terhadap kemiskinan yang mereka alami serta gagasan-gagasan yang timbul dari kelompok miskin ini mengenai upaya keluar dari belenggu kemiskinan.

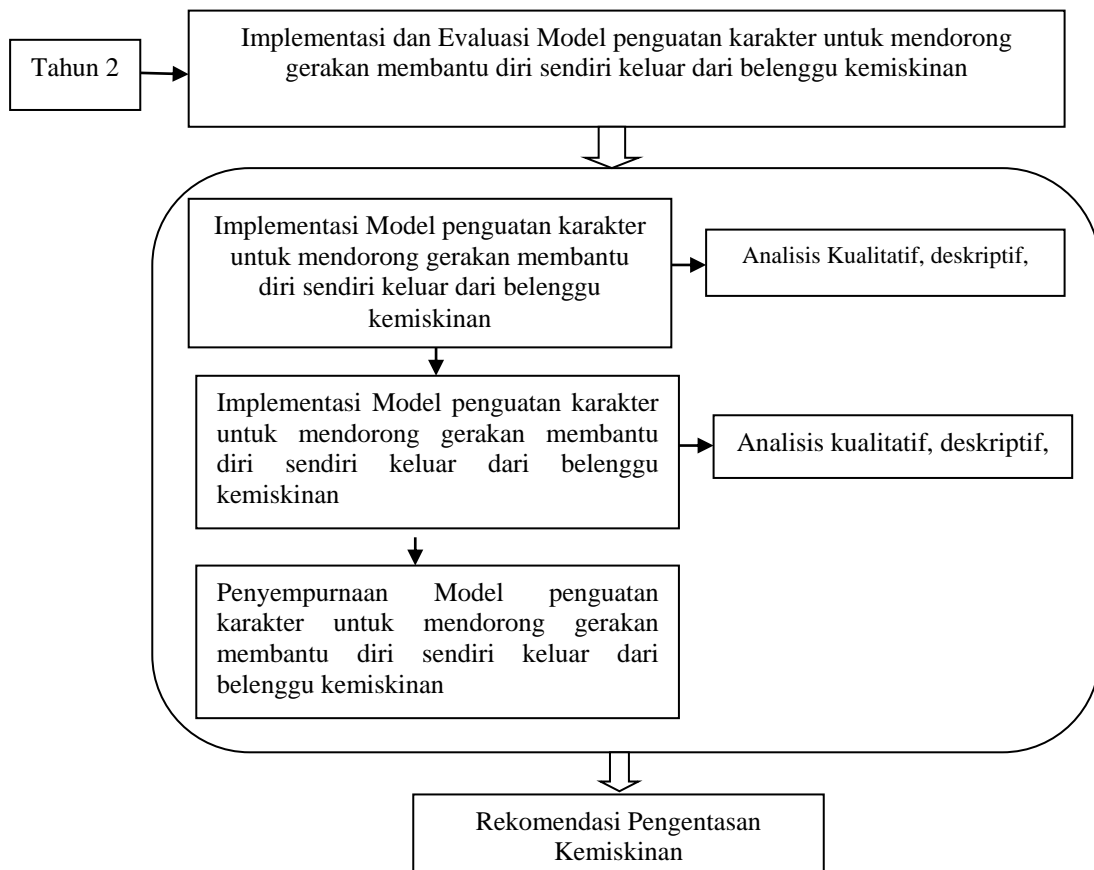
c. Melakukan Evaluasi atas Model

Dalam evaluasi model ini akan identifikasi berbagai hal terkait dengan perkembangan kelompok sasaran faktor-faktor yang mendukung, faktor faktor kendala serta kesesuaian model dengan tujuan pengembangan model.

d. Penyempurnaan Model.

Dalam penyempurnaan model ini akan dielaborasi berbagai temuan lapangan mengenai perkembangan kelompok sasaran faktor-faktor yang mendukung, faktor faktor kendala serta kesesuaian model dengan tujuan pengembangan model. Hal ini sangat penting karena akan memberikan gambaran sejauh mana model ini mampu dan berdaya guna dalam pengentasan kemiskinan dalam bentuk pengembangan *self helping movement* keluar dari kemiskinan

3.1.7. Kerangka Pikir Penelitian Tahap 2



Gambar 3.2. Kerangka Pemikiran Tahun 2

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas \pm 298.838,304 Ha, secara geografis terletak di antara 6°18'0" - 6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45" - 107°13'30" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur;
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500–1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl. Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil

letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.

Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan. Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 8 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) Sub DAS Kali Bekasi; (6) Sub DAS Cipamingkis; dan (7) DAS Cibeet. Selain itu juga terdapat 32 jaringan irigasi pemerintah, 900 jaringan irigasi pedesaan, 95 situ dan 96 mata air.

Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan yang di dalamnya meliputi 417 desa dan 17 kelurahan (434 desa/kelurahan), yang tercakup dalam 3.882 RW dan 15.561 RT. Pada tahun 2012 telah dibentuk 4

(empat) desa baru, yaitu Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya serta Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin. Luas wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan pola penggunaan tanah dikelompokkan menjadi: kebun campuran seluas 85.202,5 Ha (28,48%), kawasan terbangun/pemukiman 47.831,2 Ha (15,99%), semak belukar 44.956,1 Ha (15,03%), hutan vegetasi lebat/perkebunan 57.827,3 Ha (19,33%), sawah irigasi/tadah hujan 23.794 Ha (7,95%), tanah kosong 36.351,9 Ha (12,15%).

Secara umum, kondisi demografis Kabupaten Bogor dapat digambarkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan *estimasi* Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 berjumlah 5.111.769 jiwa (angka sementara), yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.616.873 jiwa dan penduduk perempuan 2.494.807 jiwa. Jumlah penduduk tersebut hasil proyeksi penduduk dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,44 persen dibanding tahun 2012. Angka ini merupakan laju pertumbuhan penduduk proyeksi selama kurun waktu 1 tahun (hasil proyeksi dari tahun 2012).

4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor pada tahun 2013 diprediksi mencapai Rp. 109,67 trilyun atau mengalami peningkatan sebesar 14,35 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah)

NO.	LAPANGAN USAHA	2012 ^{a)}	2013 ^{b)}	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	SEKTOR PRIMER	4.946.529,80	6.174.193,48	5,63	24,82
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3.584.125,89	4.492.110,97	4,10	25,33
2	Pertambangan & Penggalian	1.362.403,91	1.682.082,52	1,53	23,46
II	SEKTOR SEKUNDER	64.040.698,89	71.287.409,57	65,00	11,32
3	Industri Pengolahan	57.150.219,71	63.192.527,95	57,62	10,57
4	Listrik, Gas dan Air	2.804.934,10	3.123.458,52	2,85	11,36
5	Konstruksi	4.085.545,08	4.971.423,11	4,53	21,68
III	SEKTOR TERSIER	26.918.368,69	32.209.132,39	29,37	19,65
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	18.547.813,88	22.665.072,11	20,67	22,20
7	Pengangkutan & Komunikasi	4.001.149,29	4.672.465,38	4,26	16,78
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.412.588,49	1.608.025,54	1,47	13,84
9	Jasa-jasa	2.956.817,04	3.263.569,36	2,98	10,37
PDRB KABUPATEN BOGOR		95.905.597,38	109.670.735,45	100,00	14,35

Dari Tabel 4.1. sektor ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar adalah sektor industri pengolahan yang mencapai Rp. 63,17 triliun atau memiliki andil sebesar 57,60 persen terhadap total PDRB. Berikutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp.18,55 triliun (19,34 persen). Sedangkan sektor yang memiliki peranan relatif kecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp.1,58 triliun (1,44 persen).

Pengelompokan sembilan sektor ekonomi dalam PDRB menjadi tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, menunjukkan bahwa kelompok sektor sekunder masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bogor. Total Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor sekunder pada tahun 2013 mencapai Rp.71,26 triliun, atau meningkat 11,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 19,74 persen yaitu dari Rp.26,92 triliun pada

tahun 2012 menjadi Rp.32,23 trilyun pada tahun 2013. Sedangkan kelompok primer meningkat sebesar 24,82 persen atau dari Rp. 4,95 trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp. 6,17 trilyun pada tahun 2013.

Tabel 4.2.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Bogor
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah)

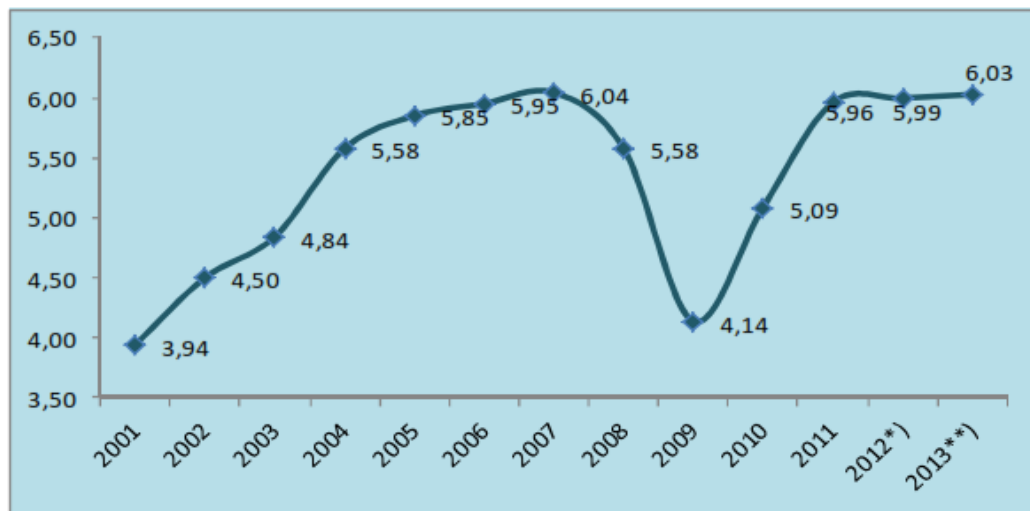
NO.	LAPANGAN USAHA	2012*)	2013**)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	SEKTOR PRIMER	1.998.117,38	2.179.957,45	5,63	9,10
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1.608.438,92	1.759.438,29	4,54	9,39
2	Pertambangan & Penggalian	389.678,46	420.519,15	1,09	7,91
II	SEKTOR SEKUNDER	24.877.113,84	26.066.046,25	67,30	4,78
3	Industri Pengolahan	22.273.315,43	23.264.924,59	60,07	4,45
4	Listrik, Gas dan Air	1.326.483,67	1.379.464,92	3,56	3,99
5	Konstruksi	1.277.314,74	1.421.656,73	3,67	11,30
III	SEKTOR TERSIER	9.655.512,28	10.485.830,17	27,07	8,60
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6.392.800,62	7.024.861,02	18,14	9,89
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.142.183,19	1.240.391,71	3,20	8,60
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	662.344,81	700.746,03	1,81	5,80
9	Jasa-jasa	1.458.183,66	1.519.831,41	3,92	4,23
PDRB KABUPATEN BOGOR		36.530.743,49	38.731.833,87	100,00	6,03

Berdasarkan harga konstan 2000, PDRB atas harga konstan tahun 2013 diprediksi mengalami peningkatan sebesar 6,03 persen, yaitu dari Rp. 36,53 triliun pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 38,73 triliun pada tahun 2013. Kinerja kelompok sektor primer tahun 2013 menunjukkan peningkatan sebesar 9,10 persen dari tahun sebelumnya, kelompok sektor sekunder meningkat 4,78 persen, dan kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 8,60 persen. Tabel 4.2 menunjukkan nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bogor beserta distribusi dan pertumbuhannya pada tahun 2012 dan 2013.

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa kinerja perekonomian tertinggi dicapai oleh sektor konstruksi yang mendorong pertumbuhan sebesar 11,30 persen. Terlaksananya berbagai pembangunan infrastruktur serta kemudahan dan adanya subsidi bunga kepemilikan rumah meningkatkan kinerja perekonomian sektor konstruksi. Kinerja yang cukup tinggi juga ditunjukkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 9,89 persen. Kinerja sektor ini didukung oleh kinerja subsektor perdagangan yang mencapai 9,99 persen karena adanya peningkatan output berbagai barang dan jasa di Kabupaten Bogor. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan juga menunjukkan kinerja yang membaik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, sektor ini tumbuh sebesar 9,39 persen yang didorong oleh program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah mulai memperlihatkan hasil yang menggembirakan.

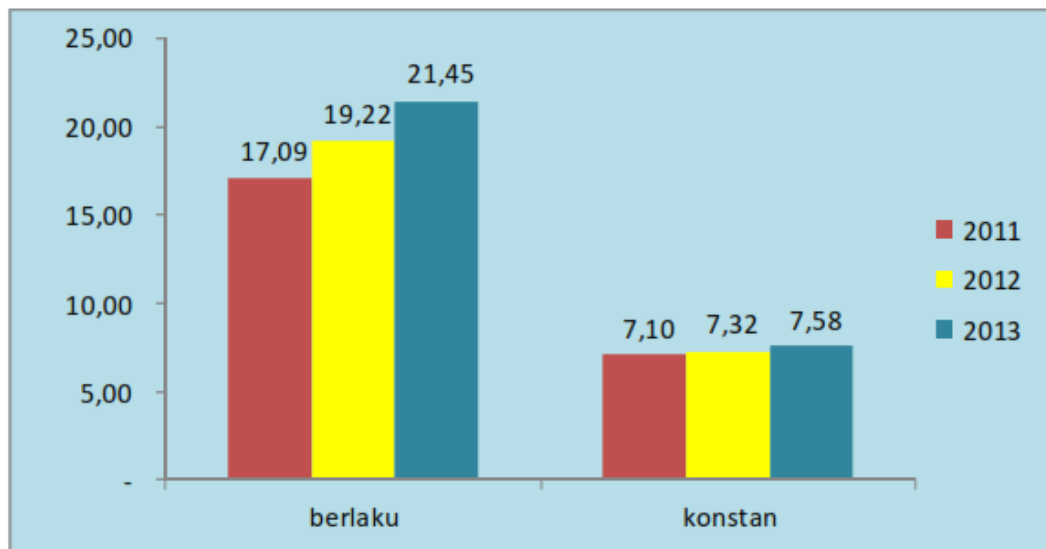
Berdasarkan *time series* dari tahun 2001-2013, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada kisaran 4-6 persen. Terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2009 yang disebabkan oleh krisis keuangan global pada tahun 2008 yang dampaknya dirasakan oleh perekonomian Kabupaten Bogor. Pertumbuhan yang sempat melambat ini kemudian meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor pada tahun 2013 diprediksi akan tumbuh sebesar 6,03 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang tumbuh sebesar 5,99 persen. Peningkatan ini hamper menyamai laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 yang mencapai 6,04. Pertumbuhan ekonomi yang

cukup baik diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor selama periode 2001-2013 ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1.
LPE Kabupaten Bogor Tahun 2001-2013 (%)

Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro salah satunya adalah pendapatan per kapita per tahun. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB perkapita dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita. Gambar 4.2. memperlihatkan PDRB perkapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku dan konstan.



Gambar 4.2.
PDRB Perkapita per Tahun Kabupaten Bogor
Tahun 2011-2013 (juta rupiah)

Gambar 4.2. memperlihatkan PDRB perkapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik menjadi Rp. 21,45 juta dari tahun sebelumnya Rp. 19,22 juta perkapita. Hal ini berarti terjadi kenaikan pendapatan perkapita sebesar 11,63 persen pada tahun 2013.

Peningkatan PDRB per kapita di atas, masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat di Kabupaten Bogor secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk mengamati perkembangan daya beli masyarakat secara riil dapat digunakan PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Bila dilihat atas dasar harga konstan, PDRB per kapita atas dasar harga konstan naik menjadi Rp. 7,58 juta dari tahun sebelumnya Rp. 7,32 juta perkapita.

Hal ini berarti terjadi kenaikan pendapatan perkapita sebesar 3,49 persen pada tahun 2013. Jika dibandingkan kenaikan PDRB atas harga berlaku dan konstan, maka kenaikan PDRB perkapita atas harga berlaku mencatatkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan harga konstan. Hal ini disebabkan pengaruh kenaikan harga-harga barang dan jasa. Selain realisasi dari kondisi ekonomi sebagaimana telah dikemukakan di atas, indikator lain untuk melihat taraf kesejahteraan masyarakat yang biasa digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk Miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prediksi pencapaian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komposit Kabupaten Bogor mencapai 73,45 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 73,08 poin. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (kemampuan daya beli masyarakat). Angka IPM sebesar 73,45 poin di atas, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera menengah atas, namun belum termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera atas;
2. Prediksi dan realisasi komponen pembentuk IPM berdasarkan estimasi BPS yaitu: a. Angka Harapan Hidup (AHH) diprediksi sebesar 70 tahun, lebih tinggi dari realisasi tahun 2012 sebesar 69,70 tahun; b. Angka Melek Huruf

(AMH) diprediksi sebesar 95,35 persen, lebih tinggi dari realisasi tahun 2012 sebesar 95,27 persen; c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diprediksi sebesar 8,04 tahun, lebih tinggi dari realisasi tahun 2012 sebesar 8,00 tahun; d. Kemampuan Daya Beli Masyarakat (*Purchasing Power Parity* = PPP) yang dihitung berdasarkan tingkat konsumsi riil per kapita per bulan, diprediksi mencapai sebesar Rp. 636.620,-/kapita/bulan, lebih tinggi dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 634.520,-/kapita/bulan.

3. Indikator lainnya yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor berdasarkan data dari basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2013 berjumlah 446.890 jiwa (8,82 persen), lebih rendah dari tahun 2012 yang berjumlah sebanyak 447.290 jiwa (8,74 persen), berarti mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 400 jiwa atau turun sekitar 0,08 persen dibandingkan dengan tahun 2012.

Untuk lebih jelasnya, Realisasi dari Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.4.
Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013

No.	Indikator	Realisasi Kinerja		
		2011*	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)	72,58	73,08	73,45
	Komponen IPM terdiri dari;			
	a. Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	69,28	69,70	70,00
	b. Angka Melek Huruf (AMH) (%)	95,09	95,27	95,35
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,99	8,00	8,04
	d. Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)	631,63	634,52	636,62
2.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	470.500	447.290	446.890

Sumber : BPS Kabupaten Bogor; Tahun 2012 dan TNP2K pusat.

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan masyarakat terdiri dari (1) pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pertanian, dan (4) Ketenagakerjaan, hasil evaluasi berdasarkan permendagri No 54 Tahun 2010, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

☐ Pendidikan

Pendidikan merupakan prioritas Nasional dan menjadi target dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan sampai dengan 2012 relatif berfluktuatif dengan tingkat kecenderungan tidak sesuai target. Namun Capaian kinerja Rata-rata Lama Sekolah dan Angka

Partisipasi Murni (SD – SMA) sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 7,76 tahun.

□ **Kesehatan**

Analisis kinerja kesehatan di lihat dari angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, dan prosentase balita gizi buruk. Hasil evaluasi menunjukkan capaian realisasi kinerja angka usia harapan hidup (tahun) masih di bawah target RPJMD. Jika dilihat berdasarkan nasional, bahwa kesehatan merupakan prioritas nasional, maka seharusnya Kabupaten Bogor juga harus ikut melaksanakan program tersebut untuk mencapai prioritas nasional, setidaknya kabupaten Bogor harus menargetkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi mencapai 80.00% tentu hal ini tidak mudah karena harus di dukung oleh infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan lebih baik.

□ **Pertanahan**

Persentase jumlah penduduk yang memiliki Lahan Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012 sudah melebihi target, artinya bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki lahan, ini menunjukkan perkembangan yang baik di bidang pertanahan.

□ **Ketenagakerjaan**

Secara garis besar penduduk dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia

adalah berumur 15 tahun-64 tahun. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja tidak sesuai target, sehingga kemungkinan jumlah pengangguran masih besar.

4.3. Urusan Wajib

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah Kabupaten Bogor melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Hasil evaluasi terhadap kinerja berdasarkan urusan dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

□ Pendidikan

Semua angka indikator yang dipakai menunjukkan peningkatan dari awal tahun 2008 sampai dengan 2012, namun demikian jika dibandingkan target kinerja yang ditetapkan masih ada yang tidak sesuai target. Seperti pada indikator fasilitas dan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi masih dibawah target yang ditetapkan.

□ Kesehatan

Di Kabupaten Bogor, urusan kesehatan merupakan tugas dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang dan RSUD Cileungsi. Jika dilihat dari aspek Peningkatan layanan Spesialis, di empat

rumah sakit tersebut masih di dominasi oleh RSUD Cibinong dengan jumlah 16 dokter dan kemudian diikuti oleh RSUD Ciawi. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit relative tidak sama, yang paling tinggi adalah RSUD Ciawi, dari 42.53% pada tahun 2008 hingga mencapai 83.80% pada tahun 2012, diikuti oleh RSUD Leuwiliang dimana Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit pada tahun 2012 mencapai 72.90%. Cakupan Desa Siaga Aktif di kabupaten Bogor cukup berkembang dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2012 mencapai 214. Dari semua fasilitas ini agar membuat urusan kesehatan cukup berkembang baik yang juga digambarkan dari Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan hingga mencapai 100% dari tahun ke tahun.

□ **Pekerjaan Umum**

Jaringan jalan di Kabupaten Bogor terdiri atas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten serta jalan lingkungan permukiman. Hingga tahun 2013 jumlah panjang jalan nasional adalah sepanjang 124,85 km dengan jumlah ruas 11, panjang jalan provinsi adalah sepanjang 121,820 km dengan jumlah ruas 10 serta jalan kabupaten adalah sepanjang 1.748,915 km dengan jumlah ruas sebanyak 458 ruas. Untuk jalan lingkungan permukiman yang meliputi jalan perumahan dan jalan desa dengan jumlah panjang jalan yang terdata sepanjang 1.038,17 km dengan jumlah ruas 505 ruas.

Kondisi jaringan jalan di Kabupaten Bogor tahun 2013 ditunjukkan dari indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yang mencapai 76,27% dengan rata-rata panjang jalan kabupaten per jumlah penduduk hanya mencapai sekitar 0,32 m/jiwa hal ini menunjukkan bahwa kapasitas penanganan jalan yang ditangani masih sangat rendah terhadap jumlah penduduk yang sangat tinggi di wilayah Kabupaten Bogor. Dari jumlah panjang jalan kabupaten yang ditangani tersebut, sekitar 2,23% sempit dan jalan digunakan oleh pedagang kaki lima dan bangunan liar dan baru sekitar 31,38% jalan yang memiliki trotoar dan drainase. Dari jumlah jalan yang memiliki drainase tersebut hanya sekitar 39,09% yang memiliki drainase yang baik. Untuk jaringan irigasi hingga tahun 2013 tercatat luas daerah irigasi (D.I) yang ada di Kabupaten Bogor adalah 1.479 Ha yang berada di 2 D.I Kewenangan Nasional, 4.482 Ha yang berada di 19 D.I kewenangan Pemerintah Provinsi, dan 47.121 Ha yang berada di 990 D.I kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dari jumlah daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten memiliki panjang saluran sepanjang 2.313,198 km.

Kondisi rasio jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Bogor hingga tahun 2013 mencapai 4,909 m/ha dengan total luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 63,50%. Terkait sektor pemakaman dan persampahan, hingga tahun 2013, rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk mencapai 24,95 sedangkan rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk mencapai 1,99 dengan mengandalkan TPA Galuga sebagai satu-satunya tempat pembuangan akhir sampah yang masih beroperasi untuk wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

□ **Perumahan**

Berdasarkan indikator rasio rumah layak huni di Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mencapai 0,18 yang menunjukkan bahwa sekitar 1 rumah layak huni di wilayah Kabupaten Bogor ditempati oleh sekitar 6 jiwa penduduk. Dengan asumsi bahwa setiap rumah tangga terdiri dari 4 orang jiwa maka dengan nilai tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga di wilayah Kabupaten Bogor yang belum menikmati rumah layak huni. Nilai tersebut diperkuat dengan data rumah layak huni yang baru mencapai 98,33% sehingga masih ada sekitar 1,67% atau sekitar 83.982 unit bangunan rumah tidak layak huni yang masih belum tertangani di Wilayah Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut lingkungan permukiman kumuh yang masih terdapat di Kabupaten Bogor sebesar 0,94% dari luas wilayah Kabupaten Bogor yang masih perlu ditangani. Terkait penyediaan prasarana perumahan dan permukiman seperti air bersih dan listrik, bahwa pada tahun 2013 jumlah rumah tangga pengguna air bersih baru mencapai 44,08% yang terdiri dari sambungan perpipaan PDAM serta sambungan pipa dan non pipa dari penyediaan sarana air bersih pedesaan.

Untuk akses penduduk terhadap air minum di Kabupaten Bogor sebagian besar menggunakan pasokan air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Kahuripan yang bersumber pada 32 unit sumber pelayanan air bersih dengan kapasitas total 2.270,5 liter/detik baik yang diambil dari sumber mata air, sumur air tanah dalam dan instalasi pengolahan air lengkap (air permukaan). Dari jumlah air bersih yang diproduksi tersebut, hingga tahun 2011, jumlah penduduk yang terlayani oleh

jaringan PDAM adalah sebanyak 678.374 jiwa atau sekitar 13,27%. Dari jumlah tersebut maka sambungan penyediaan air bersih yang bersumber dari sarana air bersih pedesaan mencapai sekitar 30,81%. Sedangkan untuk penyediaan prasarana listrik, jumlah rumah tangga pengguna listrik telah mencapai 82,88%.

□ **Perencanaan pembangunan**

Perencanaan pembangunan ini secara umum merupakan tugas dan fungsi dari Bappeda dan secara berkala terus menghasilkan produk-produk seperti (1) dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA nomor 27 tahun 2008, (2) Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA nomor 7 tahun 2009, (3) Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, dan (4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD, seluruh dokumen ini umumnya ada dan tersedia dan dihasilkan oleh Bappeda sesuai dengan periode penerbitannya. Saat ini bagian perencanaan mengembangkan sebuah system yang dikenal dengan *e-Planning*. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses perencanaan pembangunan yang sesuai dengan visi – misi kepala daerah terpilih.

□ **Lingkungan Hidup**

Kondisi lingkungan hidup dilihat berdasarkan kondisi persampahan, akses penduduk terhadap air minum, pencemaran status mutu air serta cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air. Dari sisi persampahan, jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten Bogor pada tahun 2013

yang mencapai lebih dari 5 juta penduduk maka jumlah timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 10.290 m³/hari sedangkan kapasitas jumlah sampah yang terangkut hanya mampu sebesar 1.050 m³/hari.

Kondisi lingkungan hidup dilihat berdasarkan penilaian status mutu air, menunjukkan bahwa hasil kajian yang dilakukan Badan Pengendalian Hidup Daerah kualitas beberapa sungai yang melintas di Kabupaten Bogor, diantaranya Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, dan Sungai Cileungsi berada pada level tercemar berat (Level D). Pemerintah Kabupaten Bogor telah secara rutin melakukan pengamatan terhadap sungai-sungai di DAS utama, yaitu Sungai Cisadane, Cileungsi, Cikeas, Ciliwung, Citeureup, dan Bekasi. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa penurunan kualitas air sungai tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya industri dan padatnya permukiman, namun juga sifat air sungai sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti topografi dan komposisi geologis lahan yang dilalui oleh sungai serta kerusakan lahan di hulu sungai.

Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan limbah cair sangat besar sejalan dengan banyaknya industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan limbah cair. Rata-rata volume limbah cair per tahun selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2007, yang dihasilkan dari industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya sebanyak 314.178,92 m³/bln.

□ **Pertanahan**

Realisasi Indikator kinerja urusan pertanahan yang dicapai pada tahun 2013 antara lain prosentase luas lahan bersertifikat mencapai 26,50 Ha/1000 jiwa penduduk. Ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Bogor memiliki lahan bersertifikat sebesar 265 m. Nilai tersebut terus meningkat sejak tahun 2008 sehingga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bogor. Peningkatan nilai persentase luas lahan bersertifikat juga mendorong.

□ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dari seluruh indikator seperti persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan terlihat dari tahun ke tahun memiliki perkembangan yang positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 50.15% tahun 2012.

□ **Sosial**

Indikator dari urusan sosial antara lain adalah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah), PMKS yg memperoleh bantuan sosial dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi relatif meningkat dari tahun ke

tahun, hingga mencapai 157 unit pada tahun 2012. PMKS yg memperoleh bantuan sosial dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial relatif menurun dengan tingkat prosentase yang sama. Kedua indikator tersebut diketahui pada tahun 2012 mencapai 0.03 persen. Ini menunjukkan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bogor relative menurun setiap tahunnya.

□ **Ketenagakerjaan**

Angka partisipasi angkatan kerja mencapai 61.74 persen pada tahun 2012. Sementara angka sengketa pengusaha-pekerja sejak tahun 2009 relative mengalami peningkatan namun pada tahun 2012 menurun dari 186 kasus pada tahun 2011 menjadi 179 kasus. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat, sehingga pengangguran akan semakin besar, dimana tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor pada tahun 2012 mencapai 9,07%.

□ **Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Pada tahun 2012 prosentase koperasi yang aktif di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 66,33% sebanyak 1103 koperasi. Di Kabupaten Bogor, Usaha Kecil Menengah (UKM) juga merupakan tulang punggung ekonomi Kabupaten Bogor. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil hingga pada tahun 2012 mencapai sekitar 11.216 UKM naik dari tahun 2011 sebanyak 10.000 UKM. Usaha kecil menengah di Kabupaten Bogor sangat penting bagi perekonomian karena turut menyumbang PDRB sektor industri dengan

pengolahan yang mencapai 59,59% dan menyumbang penyerapan tenaga kerja sektor industri dan pengolahan mencapai 28,86%.

□ **Otonomi Daerah**

● **Ketahanan Pangan**

Realisasi ketahanan pangan dengan indikator Ketersediaan pangan Utama tercapai pada tingkat 64,36% pada tahun 2012. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan bagi seluruh penduduk secara berkelanjutan, dengan jumlah cukup, mutu layak, aman, dan halal, didasarkan pada optimasi pemanfaatan sumber daya dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Kebijakan tersebut diarahkan pada terwujudnya kemandirian pangan masyarakat, yang antara lain ditandai oleh indikator secara mikro, yaitu pangan terjangkau secara langsung oleh masyarakat dan rumah tangga, serta secara makro yaitu pangan tersedia, terdistribusi dan dikonsumsi dengan kualitas gizi yang berimbang, pada tingkat individu dan wilayah.

● **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Terdapat delapan indikator ukuran kinerja dari Urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bogor, yaitu (1) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), (2) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, (3) Jumlah LSM (lembaga), (4) LPM Berprestasi (lembaga), (5) PKK aktif (6)

Posyandu aktif (7) Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dan (8) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.

4.4. Aspek Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara umum tingkat daya saing suatu daerah, searah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Sitepu, 2012). Untuk menentukan daya saing daerah diperlukan beberapa indikator yang jelas dan terukur. Indikator daya saing yang digunakan tertuang dalam Permendagri 54 tahun 2010, yaitu (1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, (2) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, (3) Fokus Iklim Berinvestasi, dan (4) Fokus Sumber Daya Manusia.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dalam hal ini dilihat dari dua urusan terkait yaitu urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dan urusan Pertanian.

□ Otonomi Daerah

Tingkat pendapatan perkapita penduduk (di wakili oleh Pengeluaran Konsumsi perkapita) Kabupaten Bogor relative mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Produktivitas total daerah relatif stabil, hingga pada tahun 2012 mencapai 2.20.

□ Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio atau perbandingan indeks yang diterima oleh petani dari usaha taninya dengan indeks yang dibayarkan petani dan dinyatakan dalam persen. NTP dihitung oleh BPS Kabupaten sejak tahun 2013 terhadap lima subsector yaitu sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan Rakyat dan Perikanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah NTP Gabungan. Bila angka NTP lebih besar dari 100 persen memberi indikasi bahwa Petani secara keseluruhan di lima subsektor di Provinsi/Kabupaten itu sudah sejahtera karena ada potensi untuk menabung atau membeli kebutuhan lainnya, sedangkan bila kurang dari 100 persen memberi indikasi bahwa petani di Kabupaten tersebut belum sejahtera atau dengan kata lain belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan mengacu pada criteria tersebut maka dapat disebutkan secara umum petani di Kabupaten Bogor telah sejahtera walaupun tingkat kesejahteraannya masih berada dibawah provinsi Jawa Barat.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur daerah dalam hal ini dilihat dari urusan terkait yaitu urusan perhubungan, penataan ruang, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, adm keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dan komunikasi dan informatika.

□ **Transportasi**

Aspek infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, meskipun dengan rasio panjang jalan terhadap kendaraan relatif kecil. Kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain, seperti : (1) kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas (rambu, marka, pengaman jalan, terminal dan jembatan timbang); (2) belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran modal; menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Di pihak lain, jumlah orang dan barang yang terlayani angkutan umum di Kabupaten Bogor relatif tinggi. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi, khususnya pergerakan di wilayah tengah Kabupaten Bogor.

□ **Sumber Daya Air**

Potensi sumberdaya air suatu daerah merupakan kemampuan sumberdaya air wilayah tersebut baik sumberdaya air hujan, air permukaan maupun air tanah, guna memenuhi kebutuhan terhadap air baku yang dimanfaatkan untuk kepentingan domestik, industry maupun pertanian. Sumberdaya air permukaan di Kabupaten Bogor terdiri dari air sungai, mata air dan air genangan/situ/danau, baik alam maupun buatan. Sungai-sungai yang ada, pada umumnya mempunyai

hulu di bagian selatan, yaitu pada bagian tubuh pegunungan di sekitar Gunung Salak, Gunung Gede-Pangrango dan Gunung Halimun, dengan karakteristik alirannya mengalir sepanjang tahun. Pada waktu musim hujan mempunyai debit yang besar dan mengakibatkan banjir setempat, sedangkan pada waktu musim kemarau, di beberapa alur sungai menunjukkan kecenderungan kondisi surut minimum. Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan system informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Bogor yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya permukiman yang sehat. Oleh karena itu akses masyarakat terhadap air bersih merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Pada cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 25 kecamatan. Cakupan sanitasi air bersih di 80 desa/kelurahan di 19 kecamatan, yang memiliki kapasitas produksi sebesar 2.098,5 l/dt. Sementara itu, cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 56,86%, terdiri dari PDAM 15% dan sisanya pedesaan dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor (peningkatan cakupan sarana air bersih yang dilakukan oleh unsur pemerintah hanya 1% - 2% pertahun). Rendahnya cakupan pelayanan air bersih, diantaranya karena menurunnya

ketersediaan sumber daya air baku dan daya dukung lingkungan, akibat tersumbatnya badan air/sungai oleh sedimentasi yang relatif tinggi.

□ **Listrik dan Energi**

Sedangkan untuk jaringan listrik, tingkat rasio elektrifikasinya tahun 2013 baru mencapai 82,65%, berarti masih sekitar 42,00% kepala keluarga di Kabupaten Bogor yang belum menikmati listrik, terutama pada kantong-kantong permukiman/ kampung yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik yang telah ada di setiap desa. Hal ini disebabkan tingginya kebutuhan energi/listrik akibat penambahan penduduk, tetapi pada sisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan pengadaan listrik sebagaimana yang diharapkan. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat akan dikembangkan konsep Desa Mandiri Energi, yaitu pemenuhan energi listrik dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, piko hidro, surya dan bioenergi. Penerangan jalan dan sarana jaringan utilitas di Kabupaten Bogor telah dibangun cukup memadai. Namun masih belum mencapai standar yang diinginkan dan belum dibentuk ke dalam suatu jaringan utilitas terpadu. Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya pada daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah rawan sosial yang sampai dengan saat ini mencapai 44,17 % atau 12.472 titik lampu dari rencana jumlah titik lampu 28.848 titik (berdasarkan setiap 50 m dari panjang jalan provinsi). Kegiatan ini akan secara terarah dilaksanakan pembangunannya termasuk pemeliharaannya.

□ **Pos dan Telekomunikasi**

Peranan pos dan telekomunikasi dalam struktur perekonomian Kabupaten Bogor memang tidak begitu dominan, tetapi dalam menunjang pembangunan di daerah ini cukup besar. Tanpa adanya kontribusi telekomunikasi, dunia usaha di daerah ini tidak semaju seperti sekarang. Berbagai usaha pemerintah untuk memperlancar pelayanan komunikasi, salah satunya peningkatan mutu layanan jasa Pos. Namun tidak dapat dipungkiri dengan maraknya pengembangan teknologi informasi, pemakaian jasa Pos semakin berkurang. Sedangkan pemakaian internet dan telekomunikasi yang menggunakan teknologi *wireless* terus berkembang pesat.

□ **Lingkungan Hidup**

Kondisi fisik sungai-sungai di DAS dan Sub DAS di bagian selatan umumnya memiliki beda tinggi antara dasar sungai dengan lahan di sekitar berkisar antara 3,0 - 5,0 m, sehingga aliran sungai berpotensi untuk meluap di sekitarnya, baik akibat banjir maupun arus balik akibat pembendungan. Sedangkan untuk bagian utara-barat (Cimanceuri dan Cidurian Hilir) beda tinggi antara dasar sungai dan lahan bantaran di sekitarnya umumnya > 5 m, sehingga umumnya menyulitkan untuk pengambilan langsung maupun pembendungan. Berdasarkan hasil studi “*Preliminary Study on Ciliwung Cisadane Flood Control Project, 2001*” di Kabupaten Bogor terdapat lokasi yang berpotensi untuk pembuatan waduk, yaitu Waduk Sodong dan Waduk Parung Badak. Waduk ini berfungsi sebagai pengendali banjir maupun irigasi. Rencana waduk Sodong berlokasi di Sungai

Cikaniki Kecamatan Leuwiliang, anak sungai Cisadane dengan potensi genangan 3,069 km² dan volume 24,027 juta m³. Sedangkan Waduk Parung Badak berada di bagian Hulu Sungai Cisadane di Kecamatan Rancabungur, dengan potensi genangan 2,75 km² dan volume 40,069 juta m³.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2007 diketahui bahwa :

- Sungai Ciliwung, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II tetapi memenuhi untuk kelas mutu III dan IV;
- Sungai Cileungsi, kadar rata-rata dari parameter BOD melampaui kelas mutu I IV;
- Sungai Cisadane, kadar rata-rata dari parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II tetapi memenuhi kelas mutu II dan IV;
- Sungai Kalibaru, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;
- Sungai Cikeas, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;
- Sungai Cikaniki, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II tetapi memenuhi untuk kelas mutu III;
- Sungai Cibeet, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV; Sungai Cipamingkis, kadar rata-rata parameter BOD memenuhi untuk kelas mutu IV.

Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun 2006 di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah mata air terdapat danau atau situ sebanyak 95 buah dengan luas 496,28 Ha, Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoir atau empat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi dan budidaya perikanan. Berdasarkan topografi wilayah masih ada beberapa lokasi yang memungkinkan untuk dikembangkan situ-situ buatan yang dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air baku, resapan air, maupun pengendali banjir (*Retarding Basin*). Air tanah merupakan sumber alam yang potensinya (kuantitas dan kualitasnya) tergantung pada kondisi lingkungan tempat proses pengimbuhan (*groundwater recharge*), pengaliran *groundwater flow*) dan pelepasan air bawah tanah (*groundwater discharge*) yang berlangsung pada suatu wadah yang disebut cekungan air bawah tanah, terdiri dari air anah dangkal dan air tanah dalam.

Volume air tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan usaha di Kabupaten Bogor sebanyak 338.727,2 m³/hari (data SoER Kabupaten Bogor, 2007). Secara umum kualitas air permukaan di Kabupaten Bogor masih cukup baik, artinya belum ada pencemaran oleh industri yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun 2006 di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah mata air terdapat danau atau situ sebanyak 95 buah dengan luas 496,28 Ha, Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoir atau empat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi dan budidaya perikanan.

Berdasarkan topografi wilayah masih ada beberapa lokasi yang memungkinkan untuk dikembangkan situ-situ buatan yang dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air baku, resapan air, maupun pengendali banjir (*Retarding Basin*). Air tanah merupakan sumber alam yang potensinya (kuantitas dan kualitasnya) tergantung pada kondisi lingkungan tempat proses pengimbuhan (*groundwater recharge*), pengaliran *groundwater flow*) dan pelepasan air bawah tanah (*groundwater discharge*) yang berlangsung pada suatu wadah yang disebut cekungan air bawah tanah, terdiri dari air anah dangkal dan air tanah dalam. Volume air tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan usaha di Kabupaten Bogor sebanyak 338.727,2 m³/hari (data SoER Kabupaten Bogor, 2007). Secara umum kualitas air permukaan di Kabupaten Bogor masih cukup baik, artinya belum ada pencemaran oleh industri yang mengkhawatirkan.

Dalam urusan lingkungan hidup, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengendalikan tingkat pencemaran air sungai di Kabupaten Bogor. Upaya tersebut antara lain melalui pemantauan kualitas air sungai secara periodik, penguatan kapasitas kelembagaan melalui program *Environmental Pollution Control Management* (EPCM), produksi bersih, serta penegakkan hukum lingkungan. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program tersebut telah dapat membangun komitmen industri di dalam mewujudkan pemulihan kualitas air sungai. Sementara dari sisi penegakkan hukum lingkungan telah dilakukan penanganan terhadap industri pencemar. Namun demikian, apabila

memperhatikan kondisi kualitas air, upaya-upaya pengendalian tingkat pencemaran air yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan efek signifikan terhadap pergeseran status mutu air ke tingkat yang lebih baik. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya partisipasi sektor industri dalam program EPCM dan produksi bersih serta belum optimalnya upaya penegakkan hukum di dalam memberikan efek *shock therapy* terhadap pelaku pencemar.

Terkait dengan perkembangan kondisi air tanah di Kabupaten Bogor, beberapa cekungan air tanah kritis secara umum memperlihatkan kondisi ketersediaan air tanah yang semakin menurun dari tahun ke tahun sebagai implikasi dari meningkatnya pengambilan air tanah untuk keperluan industri, domestik serta komersial.

Langkah-langkah konservasi dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah telah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mengendalikan laju penurunan air tanah, terutama di cekungan air tanah kritis. Langkah tersebut meliputi pemantauan kondisi air tanah, pengendalian pemanfaatan pengambilan air tanah melalui perijinan dan mekanisme disinsentif, pengawasan dan penertiban pengambilan air tanah secara ilegal serta pembuatan percontohan sumur resapan dalam di kawasan tapak industri. Kedepan, untuk memulihkan kondisi air tanah di Cekungan air tanah kritis masih diperlukan penguatan dan peningkatan efektivitas dari pola langkah-langkah sebagaimana telah ditempuh, serta mendorong partisipasi sektor industri di dalam mengembangkan sumur resapan dalam di kawasan industri. Dalam jangka panjang, perkembangan ekonomi

wilayah perlu diarahkan pada aktivitas ekonomi yang berkarakter hemat konsumsi air tanah untuk menekan laju pemanfaatan air tanah. Berkenaan dengan aspek kualitas udara, tingkat aktivitas yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan yang mengakibatkan polusi udara yang cukup memprihatinkan. Kontribusi gas buang kendaraan bermotor terhadap polusi udara telah mencapai 50-70 %. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat ini semakin banyak industri yang mulai menggunakan batu bara sebagai sumber energy yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara.

Bencana gerakan tanah (tanah longsor) merupakan peristiwa alam yang seringkali mengakibatkan banyak kerusakan, baik berupa kerusakan lingkungan maupun kerusakan prasarana dan sarana fisik hasil pembangunan serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik berupa harta benda maupun korban jiwa manusia. Pada umumnya bencana tanah longsor dipicu oleh turunnya curah hujan yang cukup tinggi, disamping kondisi kelerengan lahan yang cukup terjal dan tidak tertutup oleh vegetasi serta sifat batuan atau tanah yang cukup sensitif terhadap kondisi keairan.

Fokus Iklim Berinvestasi

Jumlah dan macam pajak yang diterbitkan relatif sama dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2012, jumlah dan macam pajak ada sebanyak 10 sementara jumlah dan retribusi daerah mencapai 28 jenis retribusi dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Pada tahun 2012 jumlah dan macam retribusi hanya sebanyak 17 retribusi.

Disisi lain, jumlah perda yang mendukung investasi mencapai 78 perda pada tahun 2012. Perda dapat menjadi sebuah motivasi ataupun menurunkan minat pengusaha dalam berinvestasi, sehingga untuk setiap perda yang diterbitkan haruslah mendukung iklim investasi di daerah. Karena investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah.

Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan lokal, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumberdaya strategis nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda (*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah.

Sektor industri merupakan komponen utama pembangunan daerah yang mampu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar, tingkat penyerapan tenaga kerja yang banyak dan terjadinya transformasi kultural daerah menuju ke arah modernisasi kehidupan masyarakat. Kinerja sektor industri menengah dan besar pada tahun 2012, dengan nilai investasi Rp.3.542.983.620.890,- menyerap tenaga kerja 89.778 orang. Sektor industri menengah besar didominasi oleh industri agro

dan loga dengan nilai investasi sebesar Rp.893.036.061.134,- dan Rp.553.612.343.219,-, sementara itu industri menengah besar yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industry tekstil dengan jumlah tenaga kerja sebesar 24.403 orang

Sementara potensi industri kecil menengah pada tahun 2012 nilai investasinya mencapai Rp.90.639.055.552,- menyerap tenaga kerja sebesar 21.172 orang. IKM agro merupakan industri kecil menengah yang paling mendominasi dengan nilai investasi mencapai Rp.26.940.666,- IKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah IKM tekstil dengan jumlah tenaga kerja sebesar 8.596 orang. Pengembangan perdagangan di Kabupaten Bogor difokuskan pada pengembangan sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Adapun peningkatan akses pasar dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui promosi/pameran produk dan misi perdagangan. Jumlah usaha perdagangan yang terdata pada tahun 2012 sebanyak 8982 perusahaan yang diharapkan pertumbuhannya meningkat 1,05% setiap tahunnya. Jumlah investor berkala nasional (PMDN/PMA) kurun waktu 2008-2013 mencapai 678 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.3.683.380.657.182,- hal tersebut menjadikan kabupaten peringkat ke-6 dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk realisasi PMA dan PMDN.

Perkembangan koperasi selama kurun waktu 2011–2012 mengalami peningkatan jumlah koperasi sebanyak 4,72%, yaitu dari sebanyak 1.588 koperasi pada tahun 2011 menjadi 1.663 koperasi pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut, yang termasuk ke dalam koperasi aktif adalah sebanyak 1.026 unit pada tahun 2011 meningkat menjadi 1103 pada tahun 2012.

Sebagai upaya pembinaan dan dalam rangka mengetahuinya (aktif – tidak aktifnya), telah dilakukan advokasi kepada koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, koperasi yang bermasalah dapat difasilitasi untuk diselesaikan permasalahannya, misalnya melalui pembubaran, amalgamasi atau pembenahan. Kabupaten Bogor mempunyai sumberdaya galian baik non-logam maupun logam. Pada bahan non-logam, berupa bahan piroklastik dan batuan terobosan dari gunung berapi baik itu sudah terubahkan, terendapkan ataupun *masive* seperti pasir, andesit, gamping, tanah liat dan sebagainya. Bahan galian logam yang utama adalah emas. Bahan galian non logam ini menyebar terutama di bagian barat dan timur kabupaten Bogor dan sangat sedikit di bagian tengah. Bahan galian logam seperti emas dan galena menyebar di daerah Bogor Barat di sebagian Kecamatan Nanggung dan Cigudeg serta di daerah Bogor Timur di sebagian Kecamatan Cariu dan Tanjungsari. Bahan galian tersebut saat ini sebagian sudah dieksploitasi. Pada lokasi bahan yang sudah dieksploitasi dihasilkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Tetapi pengelolaan dampak negatif yang ditimbulkan belum dikelola dengan efektif sehingga berpotensi

menghasilkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Pertambangan bahan galian non logam, pada lokasi tertentu sudah mengganggu air tanah dan menimbulkan bahaya tanah longsor, sehingga ekonomi masyarakat pasca tambang juga terganggu.

Oleh karena itu perencanaan perbaikan lingkungan dan penyediaan alternatif aktivitas ekonomi harus segera dilakukan. Sedangkan yang belum dieksploitasi selain karena belum ekonomis, mungkin juga karena belum diketahui cadangannya secara terukur. Pada bahan tambang yang belum tereksplorasi ini, upaya menekan kerusakan lingkungan harus dilakukan (konservasi sumberdaya mineral). Sampai dengan tahun 2012 terdapat 153 pemegang SIPD/KP yang masih aktif melakukan kegiatan usaha penambangan seluas 9.511,9Ha yang menurun menjadi 116 pemegang usaha, dengan luasan sebesar 95.456,4Ha, aktivitas penambangan tanpa ijin (PETI) terus mengalami penurunan melalui upaya penertiban dengan pembinaan dan penutupan kegiatan penambangan, tercatat PETI tahun 2012 10 lokasi menurun dari tahun 2008 sebanyak di 45 lokasi dengan luas bukaan tambang 556,62Ha.

Selain sumber daya mineral logam dan non logam, Kabupaten Bogor juga memiliki sumberdaya alam panas bumi, dimana terdapat 15 lokasi yang terindikasi memiliki sumberdaya alam panas bumi, 13 diantaranya sudah beroperasi (Kecamatan Pamijahan), dan menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 110MW. Rencana sampai dengan tahun 2015 ke 15 lokasi sumber alam

panas bumi dapat dioperasikan. Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor cukup menjanjikan, namun belum dikelola secara optimal, proporsional dan profesional serta belum ditempatkan sebagai kegiatan industri pariwisata. Potensi pariwisata yang saat ini dimiliki oleh Kabupaten Bogor antara lain : wisata alam, wisata budaya dan wisata belanja. Kawasan Puncak (di sepanjang koridor jalan) pada waktu-waktu tertentu menjadi daya tarik wisata. Hal ini terlihat dari kunjungan wisatawan domestik (sebagian besar berasal dari penduduk Kota Jakarta) yang jumlahnya cukup signifikan, terutama pada waktu akhir pekan atau libur nasional.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan para pelaku pariwisata belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan industri pariwisata Kabupaten Bogor. Kunjungan wisatawan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 3.331.000 akan tetapi realisasinya mencapai 4.696.627 orang terdiri dari 140.804 orang wisatawan mancanegara dan 4.555.823 orang wisatawan nusantara. Pada tahun 2013 kunjungan wisatawan mencapai 4.125.130 orang.

Fokus Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang baik dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2012 mencapai 176.71 dengan tingkat ketergantungan sebesar 53.35 di tahun yang sama. SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh

potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2012 menurut hasil Sensus Penduduk sebanyak 4.989.939 jiwa dan pada tahun 2013 telah mencapai 5.111.769 jiwa naik sebesar 2,44%. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor memberikan kontribusi sebesar Rp. 11,08% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 43.053.732 jiwa dan merupakan jumlah terbesar diantara kabupaten/kota di Jawa Barat.

Dari komposisi umur penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2013, yaitu usia 0-14 tahun sebanyak 1.623.093 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 3.331.176 jiwa dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 157.500 jiwa, maka angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 53,45 yang berarti diantara 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 53 orang penduduk usia non produktif.

Jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011, dari 222.638 orang, menjadi 198.949 orang, pada tahun 2012 turun sebanyak 23.689 orang (atau sekitar 10,64%). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menurunkan jumlah pengangguran telah menunjukkan hasil yang memadai, baik yang dilakukan dengan cara mengundang investor, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan para pekerja maupun upaya lainnya melalui kemudahan untuk membuka usaha baru dan wirausaha mandiri di sektor formal maupun informal.

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 65,11% bila dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 2,57%. Kondisi ini disebabkan implikasi dari bertambahnya angkatan kerja dari luar kabupaten Bogor yang mendapatkan kesempatan kerja atau peluang kerja sehingga berpengaruh terhadap proporsi dari tingkat partisipasi angkatan kerja lokal.

Berkenaan dengan pembangunan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bogor, perkembangan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi

dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

4.5. Penelaahan RTRW

Dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007, maka diperlukan sebuah instrumen kebijakan yang komprehensif dan multi-sektor yang mampu mengarahkan perkembangan wilayah dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah menyusun dokumen RTRW melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, dimana Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten/kota yang lebih awal menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007.

Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2013 dilakukukan revisi dan sedang dalam proses penetapan. Revisi rencana tata ruang ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan terkait terbitnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pusat dan provinsi yang mempengaruhi sistematika, substansi dan arah kebijakan penataan ruang di wilayah Kabupaten Bogor. Terkait materi perubahan substansi RTRW Kabupaten Bogor tersebut maka berikut ini dilakukan penelaahan rencana tata ruang sebagai matra pemanfaatan spasial terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor

sebagai salah satu bahan kebijakan yang akan diacu. Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah yang direvisi meliputi tujuan, kebijakan dan strategi; perwujudan struktur ruang; perwujudan pola ruang serta perwujudan kawasan strategis.

4.6. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor internal (*strengths, weakness*) dan faktor eksternal (*opportunities, threats*), maka pembangunan daerah Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada permasalahan pokok sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin dengan tingkat pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan. Masih rendahnya tingkat pendidikan diperlihatkan oleh: (1) masih tingginya angka buta huruf; (2) masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RRLS) masyarakat Kabupaten Bogor yang pada tahun 2013 baru mencapai 8,04 tahun, atau baru mencapai kelas 2 SLTP yang berarti tidak tamat SLTP; (3) masih rendahnya jumlah guru yang bersertifikat profesional di semua jenjang tingkat pendidikan; (4) belum sesuai kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan dengan kebutuhan dan tuntutan peningkatan daya saing. Rendahnya tingkat kesehatan ditandai oleh indikator Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bogor yang masih rendah. Indikator lainnya yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat kesehatan adalah: (1) tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); (2) tingginya angka gizi buruk pada anak balita; (3) rendahnya pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan; (4) rendahnya angka aksesibilitas pelayanan kesehatan; dan (5) masih terdapat lingkungan dengan sanitasi buruk serta pola hidup tidak sehat.

- b. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat. Rendahnya ekonomi masyarakat terlihat dari masih rendahnya pendapatan per kapita. Permasalahannya meliputi investasi belum optimal, rendahnya ekspor, kurang vitalnya pertanian, belum berdayanya industri kecil menengah (IKM), belum berkembangnya pariwisata secara merata, belum berdayanya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), rendahnya daya beli masyarakat, masih tingginya pengangguran, serta masih tingginya angka kemiskinan. Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Permasalahannya belum efisien dan efektifnya birokrasi, masih adanya kendala pada kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal. Masih rendahnya infrastruktur pendukung merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Bogor. Berkembangnya sektor industry belum dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Rendahnya ekspor terjadi karena kualitas produk yang kurang sesuai dengan permintaan dan standar internasional, kurangnya akses pasar, belum optimalnya pengembangan keberagaman produk ekspor, belum optimalnya fasilitasi ekspor, serta krisis ekonomi global yang berdampak pada menurunnya permintaan. Pengembangan

agroindustri belum optimal dalam pengolahan dan pemasarannya, pengembangan pada sistem pertanian masih bersifat parsial, serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya ketersediaan input produksi pertanian dan belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi, belum meningkatnya produksi dan stok bahan pangan pokok, belum terkendalinya tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat, belum terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok serta belum terbentuknya pola kawasan industri yang baik di Kabupaten Bogor. Hal-hal tersebut mengakibatkan tidak terakomodasinya seluruh sektor industri di Kabupaten Bogor. Produktivitas dan kualitas hasil pertanian masih rendah sebagai akibat belum meratanya penerapan teknologi, rendahnya kualitas SDM dan kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian serta belum memadainya dukungan sarana dan prasarana. Wilayah budidaya pertanian relatif masih terbatas di wilayah dataran rendah bagian Utara Kabupaten Bogor. Rendahnya produktivitas pertanian juga disebabkan tidak optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya seperti danau/waduk. Pengalihan tata guna lahan untuk permukiman dan industri secara tidak terkendali mengakibatkan penyusutan lahan pertanian dan penurunan kualitas sumber daya air. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi lainnya adalah belum berdayanya industri kecil menengah (IKM). Hal ini terjadi karena lemahnya daya saing, rendahnya mutu produk,

lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar, keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas. Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Bogor belum digali dan dikembangkan sebagai potensi wisata Kabupaten Bogor. Peningkatan kinerja obyek dan daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta belum tersedianya dukungan sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional. Pengembangan wisata alam daerah Puncak kini dihadapkan pada isu terganggunya fungsi wilayah ini sebagai daerah konservasi. Peranan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai hal antara lain belum efisiennya sistem distribusi barang sehingga harga relatif tinggi, belum optimalnya penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, belum optimalnya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan, serta belum optimalnya penataan sarana perdagangan. Permasalahan tingginya angka

pengangguran disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang begitu besar di Kabupaten Bogor belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah. Permasalahan lainnya adalah masih tingginya angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan, serta belum tertatanya sistem distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

- c. Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Aspek infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Bogor hanya terdiri dari transportasi darat. Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi

jalan. Tingkat kemantapan jaringan jalan Kabupaten Bogor berada pada kondisi sedang. Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Selain itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Kabupaten Bogor dengan baik, termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan di Kabupaten Bogor. Keterbatasan kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain adalah kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang serta belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda, menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti kereta api dan bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi, khususnya pergerakan di wilayah Tengah Kabupaten Bogor. Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air, dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Bogor yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan

pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Selain itu, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai.

- d. Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan, baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin. Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Kondisi ini dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan jasa telepon kabel tetap, salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (*selular*). Sementara itu untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/*Universal Service Obligation* (USO) yang digagas oleh Pemerintah Pusat. Cakupan pelayanan prasarana dasar terutama di pedesaan masih rendah sebagai akibat tingginya kerusakan prasarana yang ada. Pengembangan infrastruktur wilayah masih terkendala kepada

pembebasan lahan. Sumber air baku untuk air minum di wilayah Kabupaten Bogor terutama pada musim kemarau cenderung semakin berkurang. Demikian pula mutu air tanah dan air permukaan semakin rendah sebagai akibat pencemaran lingkungan, yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah terutama di perkotaan dan pemukiman padat masih menjadi kendala sebagai akibat kurangnya lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sarana pendukung. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Hal ini tercermin dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, belum terbebasnya pemerintahan daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta belum optimalnya pelayanan publik.

- e. Kurangnya kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan social keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi. Hal ini terjadi karena semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial belum optimal seperti tercermin dengan masih adanya tempat prostitusi/warung remang-remang, harmonisasi sosial dan kerukunan di kalangan umat

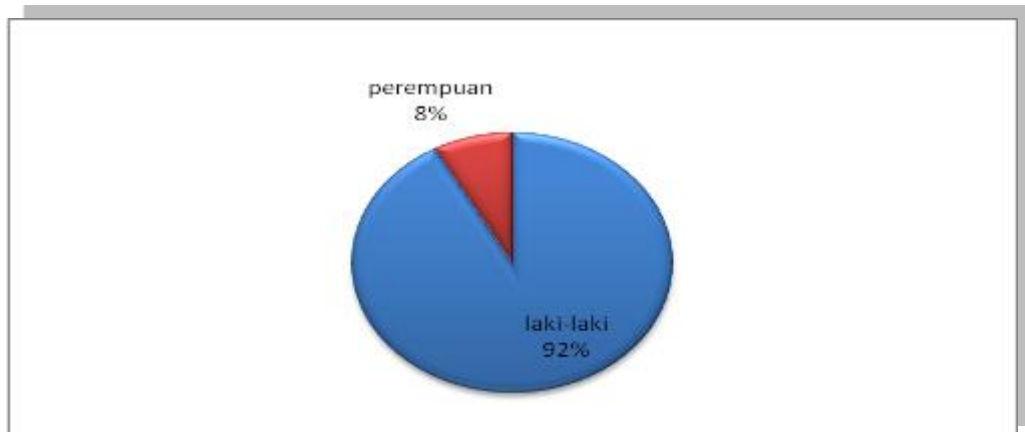
beragama belum terwujud, serta pelayanan kehidupan beragama masih terbatas.

4.7. Pengolahan Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode survei dan observasi.

4.7.1. Komposisi Responden

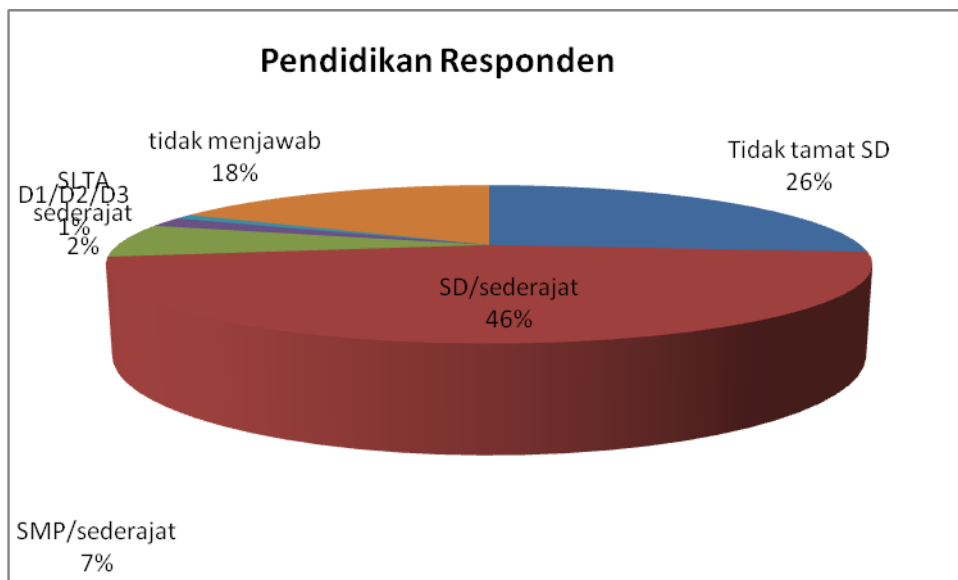
Dilihat dari jenis kelaminnya maka dari 100 responden yang menjawab kuesioner maka jumlah responden perempuan berjumlah 8 orang atau hanya 8 persen dari total keseluruhan (lihat Gambar 5.1). Hasil ini dimungkinkan karena kebanyakan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah pria, dan hanya beberapa perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Beberapa jenis pekerjaan yang tersedia di desa tersebut memang termasuk pekerjaan yang memerlukan tenaga antara lain pertanian, peternakan lengkuas, perikanan dan buruh tani. Sementara sektor yang diminati oleh rumah tangga perempuan adalah perdagangan (warung kecil) dan pertanian.



Gambar 4.3. Komposisi Responden

4.7.2. Pendidikan Responden

Dilihat dari sisi pendidikan responden, maka 46 persen responden menjawab tamat SD sederajat. Sementara responden yang tidak menamatkan SD sebanyak 26 persen. Pendidikan responden yang berada di desa Kahuripan memang relatif rendah. Hanya sekitar 3 persen yang memiliki pendidikan SLTA keatas.



Gambar 4.4. Persentase Pendidikan Responden

Bahkan 18 persen dari responden tidak menjawab pendidikan secara terbuka. Diasumsikan bahwa sebanyak 18 persen responden memang tidak memiliki pendidikan alias buta huruf maka kondisi ini sangat ironis sekali. Tabel 5.1. menerangkan tentang indikator kesejahteraan masyarakat kabupaten Bogor tahun 2011-2013 yang menerangkan bahwa tingkat melek huruf di Jawa barat sebesar 95,35 persen.

Tabel 4.5. Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013

No.	Indikator	Realisasi Kinerja		
		2011*	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)	72,58	73,08	73,45
	Komponen IPM terdiri dari;			
	a. Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	69,28	69,70	70,00
	b. Angka Melek Huruf (AMH) (%)	95,09	95,27	95,35
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,99	8,00	8,04
	d. Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)	631,63	634,52	636,62
2.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	470.500	447.290	446.890

Sumber : BPS Kabupaten Bogor; Tahun 2012 dan TNP2K pusat.

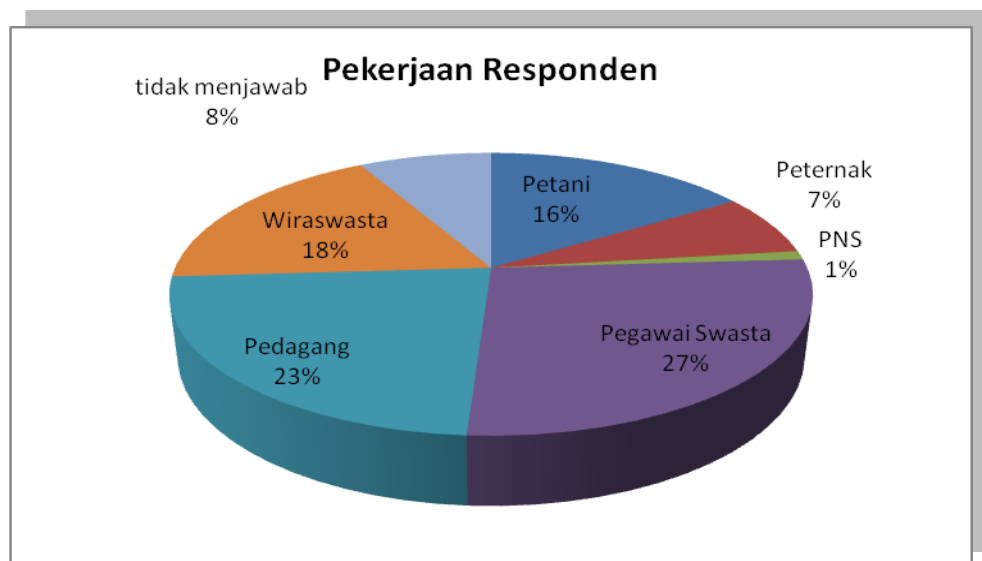
*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Jika dibandingkan dengan tingkat melek huruf dari desa Kahuripan maka bisa dikatakan bahwa masih banyak warga yang belum tersentuh akses pendidikan disana. Sekolah Dasar terdekat yang ada saat ini bisa dijangkau setelah jalan kaki selama 30 menit. Jika warga ingin meneruskan pendidikan menengah atau lanjut maka dia harus keluar dari desa tersebut dan meneruskan pendidikan dikecamatan terdekat sekitar 15 km dari desa.

4.7.3. Pekerjaan Responden

Mayoritas responden merupakan wiraswasta yang pekerjaannya dilakukan dari rumah sendiri. Sebanyak 27 persen responden menjawab kalau mereka bekerja dirumah sebagai pegawai swasta. Pada pertanyaan pekerjaan ini terjadi ambigu terhadap jawaban responden. Kebanyakan responden berpendapat bahwa kalau mereka tidak kmenjadi pegawai negeri sipil maka mereka termasuk pekerja swasta. Padahal beberapa dari mereka merupakan pekerja yang berusaha sendiri dirumah.



Gambar Pekerjaan Responden

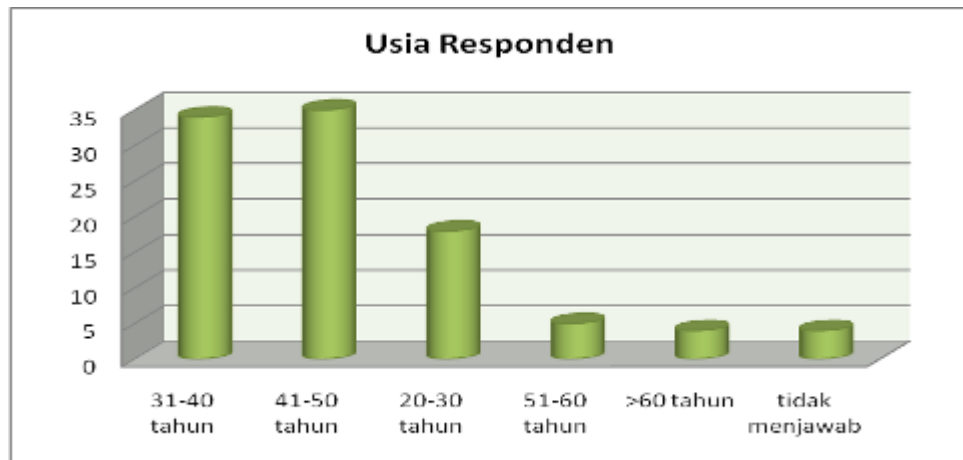
Sebanyak 18 persen responden menjawab sebagai wisaswasta yang berdiri atas usaha sendiri. Sementara itu petani dan peternak, hanya berjumlah sekitar 23 orang. Kondisi ini sangat ironis karena di desa tersebut

sebenarnya mayoritas bercocok tanam dan menjadi tulang punggung mata pencaharian penduduk.

Dalam RPJMD Kabupaten Bogor dapat dilihat bahwa adanya pengangguran terjadi karena di sisi demand, ketersediaan lapangan kerja sangat terbatas, sementara itu di sisi *supply*, kualitas angkatan kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Merujuk pada kondisi tersebut, maka kedepan perlu dirancang berbagai program untuk membuka lapangan kerja serta berbagai program untuk peningkatan kualitas angkatan kerja. Permasalahan tingginya angka kemiskinan terjadi karena kurangnya koordinasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan serta belum tertatanya system distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan serta perbaikan sistem distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

4.7.4. Tingkat Usia Responden

Dilihat dari tingkat usianya maka rata-rata usia responden adalah 41-50 tahun yaitu sebanyak 35 orang dan yang usia 31-40 tahun sebanyak 34 orang. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala rumah tangga yang bekerja adalah usia produktif.

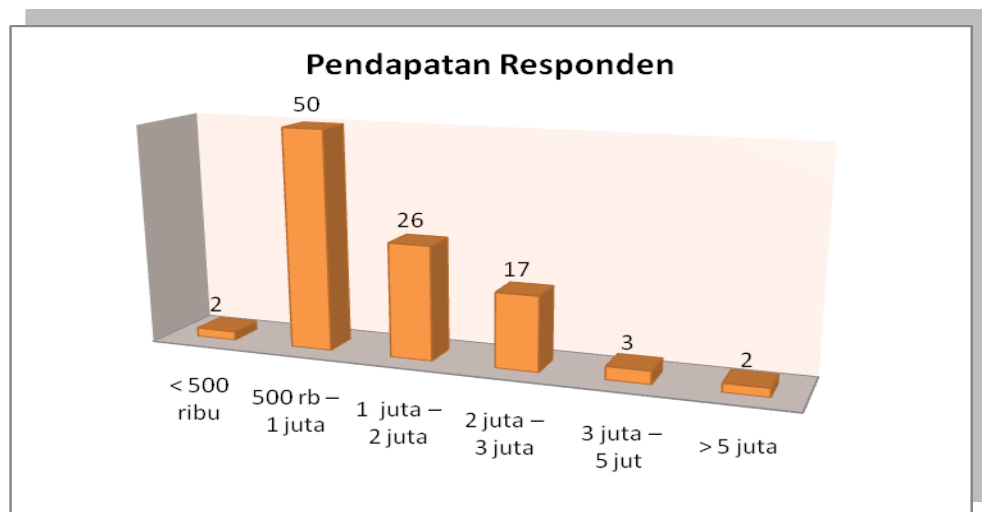


Gambar Usia Responden

Sementara itu sejumlah 18 orang responden menjawab berusia 20-30 tahun. Dengan demikian, dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, mayoritas responden memilih langsung bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

4.7.5. Pendapatan Responden

Dilihat dari sisi pendapatannya maka 50 persen responden memiliki penghasilan 500 ribu-1 juta rupiah. Apabila diasumsikan bahwa responden tersebut memiliki isteri dan 1 anak maka mereka dikategorikan sebagai warga kurang mampu.



Gambar Pendapatan Responden

Sebanyak 26 responden atau 26 persen menjawab bahwa mereka memiliki penghasilan antara 1 – 2 juta. Golongan ini dikatakan masih memiliki sisa lebih dibanding separuh responden yang mayoritas. Responden yang memiliki penghasilan ditingkat ini biasanya mereka yang pekerjaannya berdagang dan menjadi pegawai ditempat lain.

4.8. Aspek Gizi dan Kesehatan

Dari sisi kesehatan mayoritas mereka tidak mengalami penyakit yang berat sehingga memerlukan penanganan dokter. Hanya 13 persen dari mereka yang pernah mengalami sakit berat. Biasanya penyakit mereka berkaitan dengan tipes dan penyakit karena lingkungan kurang higienis seperti TBC. Selain itu akses mereka untuk ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat sangat jafrang. Mayoritas mereka menyatakan apabila sakit mereka akan membeli obat warung.



Di desa tersebut tidak tersedia layanan kesehatan seperti dokter atau puskesmas. Jika mereka ingin berobat maka mereka harus pergi ke kecamatan Parung yang letaknya kurang lebih 15 km untuk mendapatkan pengobatan. Sebagian juga menyatakan bahwa dalam satu tahun terakhir mereka keluarga mereka jarang sakit berat yang sampai memerlukan penanganan kesehatan secara serius.

Disisi lain responden menganggap peran pemerintah dalam menyediakan kesehatan masih kurang. Mereka mengharapkan pemerintah bisa membuat layanan kesehatan yang menjangkau desa mereka. Sebagian dari mereka masih mengkonsumsi air yang kurang baik untuk kesehatan karena bercampur dengan air dari pembuangan kotoran ternak.

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya permukiman yang sehat. Oleh karena itu akses masyarakat terhadap air bersih merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Pada cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 25 kecamatan. Cakupan sanitasi air bersih di 80 desa/kelurahan di 19 kecamatan, yang memiliki kapasitas produksi sebesar 2.098,5 l/dt. Sementara itu,

cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 56,86%, terdiri dari PDAM 15% dan sisanya pedesaan dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor (peningkatan cakupan sarana air bersih yang dilakukan oleh unsur pemerintah hanya 1% - 2% pertahun). Rendahnya cakupan pelayanan air bersih, diantaranya karena menurunnya ketersediaan sumber daya air baku dan daya dukung lingkungan, akibat tersumbatnya badan air/sungai oleh sedimentasi yang relatif tinggi.

4.9. Aspek Pengetahuan

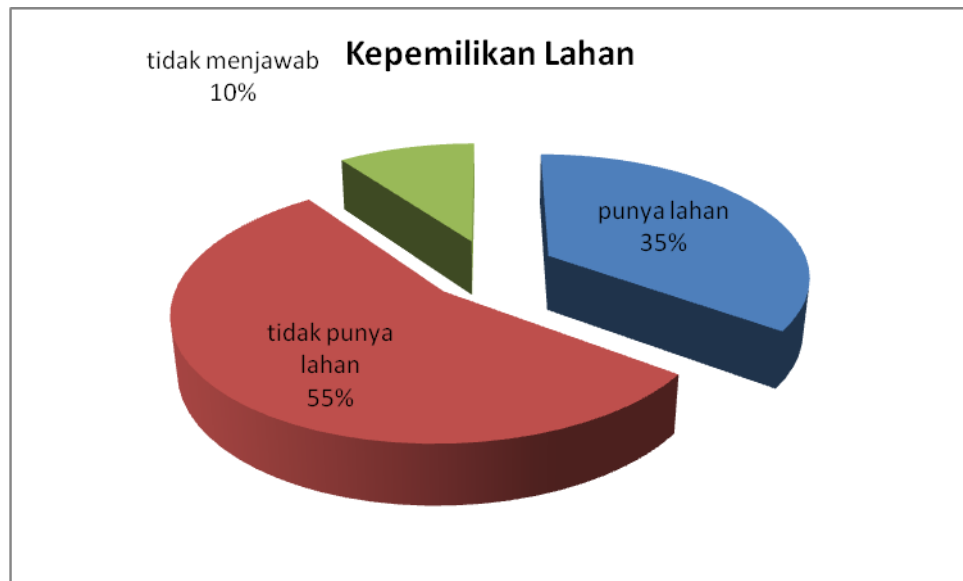
Jika dilihat dari sisi pendidikan maka mereka sebenarnya sudah mengetahui bahwa mereka sudah menyekolahkan anaknya sampai tingkat SLTA, bahkan sarjana. Dengan pendidikan orangtuanya yang terbatas sehingga sulit untuk mencari pekerjaan maka mereka sadar bahwa pendidikan merupakan jembatan seseorang untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu mereka akan berusaha menyekolahkan anaknya hingga pendidikan tinggi.

Ditinjau dari kelanjutannya sekolah maka mayoritas responden menjawab semua anak sekolah, minimal pendidikan dasar. Beberapa diantaranya sekolahnya hanya sebatas SMP karena ketiadaan biaya. Ironisnya beberapa diantaranya juga tidak memiliki ketrampilan yang memadai. Dengan demikian maka kemiskinan mereka sangat massif, tidak mampu namun tidak memiliki ketrampilan. Namun demikian mayoritas mereka memiliki ketrampilan diluar pertanian seperti perajin tradisional, menyopir, menjahit sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencari penghasilan.

Untuk itu peran pemerintah harus lebih ditingkatkan. Harapan untuk bisa mengakses pendidikan sampai tingkat SMA sangat diharapkan oleh mereka. Beberapa sarana yang diperlukan antara lain sekolah yang dibangun tidak terlalu jauh dari tempat mereka dan infrastruktur jalan yang memadai mutlak diperlukan.

4.10. Aspek Lingkungan Alam

Jika dilihat dari aspek lingkungan alam maka mayoritas mereka tidak memiliki lahan yang digunakan untuk berusaha. Banyak keluarga yang masih menumpang orang tua. Sebanyak 55 persen responden menyatakan tidak memiliki lahan, dan hanya 35 responden yang menyatakan memiliki lahan. Ironisnya mereka yang memiliki lahan luar lahannya rata-rata lebih dari 500 meter bahkan melebihi 1000 meter. Dengan demikian kepemilikan lahan di desa Kahuripan dimiliki oleh beberapa orang saja, sehingga mereka bisa berusaha seperti bertani, beternak dan memelihara ikan.



Rendahnya daya beli masyarakat terjadi karena berbagai hal antara lain: belum efisiennya sistem distribusi barang sehingga harga relatif tinggi, belum optimalnya penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, belum optimalnya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan, serta belum optimalnya penataan sarana perdagangan. Berangkat dari kondisi ini, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan efisiensi sistem distribusi barang, pengelolaan stabilitas harga, peningkatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, peningkatan pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan, serta penataan sarana perdagangan seperti pasar modern maupun pasar tradisional.

Pekerja yang tidak memiliki lahan biasanya bekerja sebagai buruh tani atau industri untuk mencukupi penghidupan keluarga. Jika mereka memilih menjadi buruh maka mereka biasanya bekerja di kota terdekat. Dengan pendidikan yang terbatas maka mereka agak sulit untuk bekerja di sektor formal

dan menjadi pekerja di sektor informal. Harapan mereka dengan menyekolahkan anaknya pada tingkat pendidikan lebih tinggi maka mereka akan memiliki pendidikan tinggi dan bisa bekerja di sector formal seperti menjadi pegawai negeri sipil atau pekerjaan lainnya yang mengisyaratkan pendidikan tinggi.



Gambar MCK tradisional

Dari sisi kualitas air minum yang dikonsumsi, kebanyakan responden menyatakan bahwa kualitas air disana relative kurang bagus. Sementara itu peran pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup relative kurang. Sungai-sungai dibiarkan penuh dengan sampah dan belum ada penanganannya. Banyak penduduk yang belum memiliki kamar mandi pribadi sehingga harus mandi di pancuran atau pemandian umum. Kegiatan peternakan dilakukan tidak jauh dari rumah mereka sehingga dapat mengganggu kesehatan penghuni (Lihat Gambar 4).

4.10. Aspek Lingkungan Ekonomi

Apabila dilihat dari sisi ekonomi maka mereka biasanya mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai wirausaha. Hanya beberapa dari mereka yang mendapatkan usaha dari hasil pertanian atau perikanan. Rupanya usaha pertanian dan perikanan yang mereka miliki tidak cukup untuk menopang hidup keluarga sehingga mereka harus bekerja diluar. Dari sisi daya beli beras sangat mencengangkan.



Hampir 35 responden menjawab bahwa daya beli mereka untuk membeli beras sangat terbatas, artinya jika mereka perlu mereka harus mengalokasikan penghasilannya untuk membeli beras. Ketersediaan beras dari hasil pertanian mereka juga tidak cukup sehingga mereka harus membeli beras dari daerah lain. Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat merupakan resultante atau akumulasi

berbagai permasalahan seperti rendahnya investasi, rendahnya ekspor, kurang vitalnya pertanian, belum berdayanya IKM, belum berkembangnya pariwisata, belum berdayanya KUMKM, rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran, serta masih tingginya angka kemiskinan. Kurang vitalnya pertanian terjadi karena keterbatasan lahan, modal, alat mesin pertanian, serta teknologi. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan terus dilakukan revitalisasi pertanian.

Selanjutnya permasalahan belum berdayanya IKM terjadi karena lemahnya daya saing, rendahnya mutu produk, lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar, keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas. Sebagai implikasinya, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan daya saing, peningkatan mutu produk, perluasan keterkaitan IKM dengan industri besar, penguatan modal, serta peningkatan produktivitas. Belum berkembangnya pariwisata terjadi karena belum optimalnya penataan daerah tujuan wisata sebagai akibat rendahnya aksesibilitas, terbatasnya fasilitas umum, kurangnya diversifikasi daya tarik wisata, terbatasnya investasi untuk pariwisata, belum optimalnya penggunaan IT sebagai sarana promosi dan pemasaran pariwisata, terbatasnya kompetensi SDM di bidang pariwisata, serta belum optimalnya kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan pariwisata. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka kedepan perlu diupayakan program untuk penataan daerah tujuan wisata terpadu dengan memperbaiki aksesibilitas, fasilitas umum, diversifikasi daya tarik wisata, peningkatan investasi untuk

pariwisata, peningkatan penggunaan IT sebagai sarana promosi dan pemasaran pariwisata, peningkatan kompetensi SDM di bidang pariwisata, serta pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan pariwisata.

Permasalahan belum berdayanya KUMKM terjadi karena berbagai hal diantaranya: belum optimalnya pemberdayaan KUMKM, masih adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi, keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, keterbatasan entrepreneurship, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya dukungan stakeholders. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program pemberdayaan KUMKM secara terpadu, perbaikan prosedur dan administrasi, penguatan modal, pembukaan akses terhadap teknologi, pengembangan entrepreneurship, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan jejaring kerja dengan seluruh stakeholders.

4.11. Aspek Lingkungan Sosial

Apabila dilihat dari sisi lingkungan social maka bisa dikatakan bahwa tingkat to menolong mereka masih tinggi. Hal ini bisa dimungkinkan karena kebanyakan mereka adalah penduduk asli warga disitu sehingga hubungan kekerabatannya sangat kuat. Hidup rukun merupakan asset tersendiri untuk membangun perekonomian desa. Selain itu jarang terjadi permasalahan antar mereka di masyarakat. Apabila ada masalah akan dimusyawarahkan di RT untuk dicarikan penyelesaiannya.

4.12. Aspek Struktur Sosial dan Pelayanan

Dari sisi struktur dan layanan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini dibantu oleh dibangunnya jalan dan jembatan yang menghubungkan desa Kahuripan dengan kota kecamatan Parung. Akses tersebut membuka perekonomian di desa tersebut sehingga memudahkan mobilitas mereka. Namun demikian akses perbankan mereka terlalu rendah.



Gambar Akses terhadap perbankan

Gambar dibawah ini menyatakan bahwa mereka sering kesulitan menembus akses perbankan. Persyaratan perbankan yang mengisyaratkan formalitas dokumen menyulitkan mereka sehingga banyak mereka yang lebih memilih pada bank cicil atau makelar kredit dengan bunga yang relatif tinggi.

4.11. Potensi Pemberdayaan

Beberapa potensi yang bisa dikembangkan di desa Kahuripan dan Ciseeng adalah adanya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa lahan malah dibiarkan tidak maksimal pengelolaannya. Tabel berikut menerangkan potensi pemberdayaan yang diharapkan bisa ditingkatkan potensinya.

Tabel Potensi Pengembangan Sumber daya

Potensi	Budi Daya	Kendala
Pertanian	Pertanian lengkuas	Masih tradisional, lahan tidak luas, pangsa pasar rendah
	kebun singkong	Pangsa pasar tinggi, kemampuan dalam bertani menghasilkan bibit unggul rendah, kurangnya pelatihan dari pemerintah setempat
	Tanaman sereh, jahe	Pengelolaannya kurang serius sehingga hasilnya tidak maksimal
Peternakan dan perikanan	domba	Keterbatasan modal untuk membeli domba, kandang yang masih tradisional dan tidak menganut aspek higienitas
	Sapi	Keterbatasan modal
	Perikanan	Budidaya tradisional, pengetahuan terbatas, pangsa pasar tinggi
UKM	Warung kecil	Keterbatasan modal, kurang lengkap, pengelolaan tradisional, literasi keuangan rendah
	Konveksi	Skill ada, namun tersandera sebagai buruh. Menerima order dari luar dan bukan memproduksi untuk sendiri. Desain terbatas tanpa ada upaya meningkatkan pengetahuan.
	Tanaman hias	Iklim mendukung, pangsa pasar ada namun tidak ada kemampuan untuk mengelola

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa sebenarnya sector pertanian dan peternakan masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Seperti lazimnya pelaku usaha kecil dan menengah maka keterbatasan modal menjadi masalah klasik yang perlu dituntaskan.



Gambar : Peternakan yang masih Tradisional

Masalah kedua yaitu berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan sehingga inovasi berjalan lambat. Sebenarnya dari usaha konveksi yang sudah dijalankan mereka bisa membuat jahitan lebih bagus dan bisa berinovasi sendiri, namun hal ini tidak mereka lakukan. Mereka menerima pekerjaan sebatas orderan tanpa ada usaha untuk melakukan inovasi produksi. Untuk itu pemberian pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan penghasilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Ciseeng terutama didesa yang menjadi sampel, dalam pemberantasan kemiskinan. Jika dilihat dari aspek lingkungan alam maka mayoritas mereka tidak memiliki lahan yang digunakan untuk berusaha. Sementara itu keterbatasan keahlian dan modal menjadi satu kendala bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Disisi lain masih banyaknya lahan yang tidak digunakan sebenarnya bisa menjadi alternatif bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan.

Sector pertanian dan peternakan masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Seperti lazimnya pelaku usaha kecil dan menengah maka keterbatasan modal menjadi masalah klasik yang perlu dituntaskan. keterbatasan pengetahuan sehingga inovasi berjalan lambat. Sebenarnya dari usaha konveksi yang sudah dijalankan mereka bisa membuat jahitan lebih bagus dan bisa berinovasi sendiri, namun hal ini tidak mereka lakukan. Mereka menerima pekerjaan sebatas orderan tanpa ada usaha untuk melakukan inovasi produksi. Hal ini mkenjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup warganya.

Rekomendasi

Berkenaan dengan pembangunan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bogor, perkembangan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Bogor

menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen.

Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York: W. H. Freeman and Company.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Banjo, Adewale, (2009), A Review Of Poverty Studies, Drivers And Redressive Strategies In Southern Africa, *Journal Of Sustainable Development In Africa* (Volume 10, No.4, 2009), Clarion University Of Pennsylvania, Clarion, Pennsylvania
- Carr, S.C., MacLachlan, M., Zimba, C.G., & Bowa, M. (1995). Managing Motivational Gravity in Malawi. *The Journal of Social Psychology*, 135, 659-662.
- Colquitt, J.A., LePine, J.A., & Noe, R.A. (2000). Toward an integrative theory of training motivation: A meta-analytic path analysis of 20 years of research. *Journal of Applied Psychology*, 85, 678-707.
- Gage, N.L. & Berliner, D. C. (1984). *Educational Psychology* (3rd ed.). Boston: Houghton Mifflin Company.
- Hartomo, H. & Aziz, A. (2008). *Ilmu Sosial Dasar*. Kabupaten Bogor: Bumi Aksara.
- Huraerah, Abu, (2006), *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, Pikiran Rakyat, pikiran-rakyat.com

Ifzal Ali and Hyun Hwa Son, (2007), Measuring Inclusive Growth, *Asian Development Review*, Vol. 24, p. 11-31, Asian Development Bank.

Ifzal Ali, (2007), Inequality and the Imperative for Inclusive Growth in Asia, chapter of Inequality in Asia, in Key Indicators 2007, *Asian Development Bank*, p. 1-12.

National Network Enabling Self Help Movement (Enable), Proceedings of NRLM workshop final

Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD),(1996) .
The Knowledge Economy.Science, Technology and Industry Outlook, 1996.
Paris: OECD.

Romer, Paul M., (1990) *Endogenous Technological Change*.Journal of Political Economy98(5), pp. 71-102.

Setiarso, Bambang (2003), “Pendekatan “ *Knowledge-Base Economy*” Untuk Pengembangan Masyarakat”, IlmuKomputer.com.

Sagnia, Burama K., (2005), Strengthening Local Creative Industriesand Developing Cultural Capacityfor Poverty Alleviation, *Sixth Annual Conference17-20 November 2005Dakar, Senegal*

Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel, E. R. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya*. Alih Bahasa: Indri Margareta Sidabalok. Kabupaten Bogor: Salemba Humanika.

Schaubroeck, J., Lam, S.S.K., & Xie, J.L. (2000). Collective efficacy versus self-efficacy in coping responses to stressors and control: a cross-cultural study. *Journal of Applied Psychology*, 84, 512-525.

Schwarzer, R. (Ed.). (1992a). *Self-efficacy: Thought Control of Action*. Washington, etc.: Hemisphere Publishing Corporation.

Schwarzer, R. (1992b). *Self-efficacy in the adoption and maintenance of health behaviours: Theoretical approaches and a new model*. In R. Schwarzer (Ed.). *Self-efficacy: Thought Control of Action*. Washington, etc.: Hemisphere Publishing Corporation.

Suharto, Edi (2003), “*Paradigma Baru Studi Kemiskinan*”, Media Indonesia, 10 September

Trimo Yulianto, (2005), Fenomena Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat) (*Thesis*), Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang

Woolfolk, A. (2004). *Educational Psychology* (9th ed.). Boston, etc.: Allyn and Bacon.

Woolcock, Michael, (2002), *Social Capital in Theory and Practice: Reducing Poverty by Building Partnerships between States, Markets and Civil Society*, *Working paper*, P. 20-38, UNESCO

Winarno, R. D. (2007). *Indonesian Adolescents Sexuality and Romantic Relationships*. Nijmegen: Radboud Universiteit.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap (gelar)	Dr. Etty Puji Lestari, S.E, M.Si
Jenis Kelamin	Perempuan
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
NIP	197404162002122001
NIDN	0016047403
Tempat Tanggal lahir	Banyuwangi, 16 April 1974
Email	ettypl@ut.ac.id
Nomor Telp/HP	08164260743
Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Jl Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang 15418
No Telepon/fax	(021) 7490941 Ext. 2106 Fax. 021 7434491
Lulusan yang dihasilkan	S1= S2= 7 orang S3= -
Mata kuliah yang diampu	1. Ekonomi Internasional 2. Ekonomi Moneter 3. Ekonometrika

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia	Universitas Gadjah Mada	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	Ilmu Ekonomi
Tahun Masuk-Lulus	1992 - 1997	2000 - 2002	2006 - 2011
Judul Skripsi/tesis/disertasi	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan KPR di Indonesia	Efisiensi Teknis Perbankan di Indonesia 1995-1999, Aplikasi Data Envelopment Analysis	Integrasi Perdagangan dan Keselarasan Siklus Bisnis, Studi Kasus di ASEAN-5, China, Jepang dan India
Nama Pembimbing/Promotor	Dra. Endang Sih Prapti, M.A	Drs. Andreas Budi Purnomo, M.A	1. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS 2. Prof. Dr. Purbayu Budi Santoso, MS 3. Dr. Syafruddin Budiningharto, SU

C. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2012	Masterplan Incoming Student di Universitas Terbuka.	PR IV- LPPM UT	50.000.000,-
2.	2012	Analisis Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang	LPPM UT	30.000.000,-
3.	2012	Pengukuran Kinerja Program Studi di Universitas Terbuka	LPPM UT	30.000.000,-
4.	2011	Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nabire	Bappeda Kab.Nabire Papua	250.000.000,-
5.	2011	Pengembangan Komoditas UMKM di Nabire	Bappeda Kab.Nabire Papua	250.000.000,-
6.	2010	Struktur Ekonomi Kabupaten Nabire	Bappeda Kab.Nabire Papua	250.000.000,-
7.	2009	Integrasi Perdagangan dan Keselarasan Siklus Bisnis, Studi Kasus ASEAN-4 dan Uni Eropa	DIKTI (Hibah Doktor)	50.000.000,-
8.	2007	Dampak Ketidakstabilan Nilai Tukar Rupiah terhadap Permintaan Uang M ₂ di Indonesia	DIKTI (Penelitian Dosen Muda)	10.000.000,-

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1.	2012	Penilaian Kinerja Praktis pada Asosiasi BMT se kabupaten dan kota Bogor, Jawa Barat	LPPM UT	20
2.	2012	Mengikuti kegiatan penjualan barang belas dan pasar murah dalam rangka Dies Natalis Universitas Terbuka	LPPM UT	20

E. PUBLIKASI

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/No/Tahun
1.	Trade Integration and Business Cycle Synchronization: Empirical Study of ASEAN-5, China, Japan, Korea and India	China-USA Business Review	Vol. 11 No.10. Oktober 2012
2.	Intensitas Perdagangan dan Keselarasan Sklus Bisnis, Studi Kasus ASEAN-4 dengan Uni Eropa.	Jurnal Ekonomi Pembangunan	Vol. 12 No.2. Desember 2011
3.	Penguatan Ekonomi Industri kecil dan Menengah melalui Platform Cluster Industri	Jurnal Organisasi Manajemen	Vol 6 No.2. September 2010
4.	Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA	Jurnal Ekonomi Pembangunan	Vol.10 No. 1 Juni 2009
5.	Dampak Ketidakstabilan Nilai Tukar Rupiah terhadap Permintaan Uang M_2 di Indonesia.	Jurnal Ekonomi Pembangunan	Vol.9 No. 2 Desember 2008
6.	Disparitas Efisiensi Teknik antar Subsektor dalam Industri Manufaktur Indonesia	Jurnal Organisasi dan Manajemen	Vol.3 No.1.Maret 2007

F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	10 th International Annual Symposium on Management (Universitas Surabaya)	1. Determinants Of Investment In Indonesia (Macroeconomic Assessment With VAR Model) 2. The Effect Of Macro Economic Toward The Changes Of Stock Price Index In Jakarta Islamic Index	Sanur, 16 Maret 2013
2.	Sustainable Competitive Advantage-1 (Universitas Jendral Soedirman)	Pengembangan UKM Berbasis Komoditas Unggulan	Purwokerto, 21 November 2012
3.	The First International Conference on Greenpreneurship, Indonesia (Unika Soegijopranoto	The Implementation Of CSR In Distance Learning Education	Magelang, 20-21 September 2012

	bekerjasama dengan United Nations on Principles for Responsible Management Education		
4.	International Conference: “Political Economy of Trade Liberalization in Developing East Asia” (Universitas Brawijaya)	Trade Integration and Business Cycle Synchronization, Empirical Study of ASEAN-5, China, Jepang, Korea and India	Malang, November 24-25, 2011
5.	Simposium Riset Ilmu Ekonomi di Surabaya	Disparitas Efisiensi Teknik antar Subsektor dalam Industri Manufaktur Indonesia	Surabaya, Desember 2007

G. KARYA BUKU DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah halaman	Penerbit
1.	Intensitas Perdagangan dan Keselarasan Siklus Bisnis, Studi Kasus ASEAN-4 dan Uni Eropa	2010	98 hal	Pusat Penerbit Universitas Diponegoro
2.	Sistem Keuangan Pusat dan Daerah	2008	350 hal	Pusat Penerbit Universitas Terbuka
3.	Ekonomi Koperasi	2008	220 hal	Pusat Penerbit Universitas Terbuka
4.	Bunga Rampai Ekonomi Pembangunan	2007	147 hal	Pusat Penerbit Universitas Diponegoro

H. PEROLEHAN HKI DALAM 5-10 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul /Tema HKI	Tahun	Jenis	No P/ID
1.				

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul /Tema /Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.				

J. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR (DARI PEMERINTAH, ASOSIASI ATAU INSTITUSI LAINNYA)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Lulusan Cumlaude Terbaik Wisuda Pascasarjana Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	2011
2.	Dosen Berprestasi Terbaik II Universitas Terbuka	Universitas Terbuka	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.

Jakarta, 24 April 2013
Pengusul



Dr. Etty Puji Lestari, S.E, M.Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

IDENTITAS DIRI

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Angelina Ika Rahutami, Msi
1.2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
1.3	NIP/NIK/No. Identitas lainnya	
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 22 Februari 1968
1.5	Alamat Rumah	Jl. Mawar II/10, Taman Bukit Hijau, Semarang
1.6	Nomor Telepon/Faks	024-7629579
1.7	Nomor HP	08156511363
1.8	Alamat Kantor	Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Semarang
1.9	Nomor Telepon/Faks	024-8441555/024-8445265
1.10	Alamat e-mail	a_rahutami@yahoo.com
1.11	Mata Kuliah yg diampu	1. Perekonomian Indonesia
		2. Teori Ekonomi
		3. Ekonometrika finansial

II RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1 Program:	S-1	S-2	S-3
2.2 Nama PT	Universitas Gajah Mada	Universitas Gajah Mada	Universitas Gajah Mada
2.3 Bidang Ilmu	IESP	Ilmu Ekonomi	Ilmu Ekonomi
2.4 Tahun Masuk	1986	1993	2003
2.5. Tahun Lulus	1991	1995	2007
2.6 Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Efektivitas Program Penanganan terhadap Fungsi Produksi Industri Otomotif di Indonesia Selama Kurun Waktu 1970-1988	Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Kualitas Lingkungan di Indonesia	Interaksi Kebijakan Moneter Kaidah dengan Anggaran Pemerintah di Indonesia Tahun 1980.1-2006.4: Pendekatan Sistem Ekonomi Simultan
2.7. Nama Pembimbing/ Promotor	Dr. Sri Adiningsih, M. Sc.	Dr. Anggito Abimanyu	Prof. Dr. Insukindro, MA

III PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2010	Sinergi Potensi, Program, dan Anggaran: Usaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Balitbanda DKI Jakarta	50
2	2008	Survei Efektivitas Program Bantuan Tunai Langsung di Kota Semarang	BI Semarang	59
3	2001	Pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa Dalam Rangka Pengelolaan Dana Pembangunan Di DKI Jakarta	Bappeda Propinsi DKI Jakarta	30
4	1999	Dampak Bantuan Pembangunan Dati II Di DKI Jakarta	Bappeda Tk I DKI Jakarta	20
5	2010	Contributing to Efforts for Greater Financial Markets Stability in APEC Economies	APEC	250
6	2009	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Berdaya Saing Lokal Dan Internasional Di Kabupaten Kutai Kartanegara	Bappeda Kutai Kartanegara	100
7	2009	Penerapan Media Informasi Pemasaran Daerah Terhadap Keputusan Berinvestasi : Studi Eksperimental Iklan Pemasaran Daerah	Hibah Bersaing, Dikti	30
8	2008	The Trend of Trade, Foreign Direct Investment and Monetary Flows in East Asia, and its Policy Implications” Center of Asia Pacifics Studies, Gadjah Mada University	Japan, research For The Asean+3 Research Group (2008-2009)	200
9	2008	Impact Of Foreign Investment Incentives On The Environment: A Case Study Of The Chemical Industry In Indonesia	Trade Knowledge Network – Southeast Asia	200
10	2008	IAP Peer Review Singapore	APEC	100
11	2007	Interaksi Sektor Moneter Dan Fiskal Di Indonesia Tahun 1980.1-2006.4: Pendekatan Sistem Ekonomi Simultan	Mandiri	5
12	2007	Analisis Potensi Ekonomi Regional dan Potensi Ekonomi Regional	Astra Company	100
13	2006	Aspek Persaingan Usaha terhadap	KPPU	75

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
		Kerjasama AANZ-FTA		
14	2006	Dampak kebijakan Moneter terhadap Interaksi Pasar Barang dan Pasar uang di Indonesia	Bank Indonesia	20
15	2006	Pelayanan Birokrasi Perizinan Usaha di Kabupaten Bantul	KPPOD	5
16	2003	Perkembangan Teknologi Industri Manufaktur Indonesia : Keberadaan Penanaman Modal Asing Dan Fenomena <i>Pollution Havens</i>	Mandiri	5
17	2002	Kajian Tingkat Investasi di Kabupaten Kendal	KPPOD dan The Asia Foundation	5
18	2002	Survey Kebutuhan Pecahan dan Jenis Uang Rupiah	BI Semarang	69
19	2002	Studi Identifikasi Kinerja Dan Perilaku Kewirausahaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Wonogiri	P3M Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata	3
20	2001	Analisis Pengaruh Kebijakan Ekonomi Makro Terhadap Efisiensi Ekonomi Indonesia (1980.1-1999.4)	Lembaga Penelitian Unika Soegijapranata- Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia	3

IV PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2010	Pemetaan Ekonomi Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur	Universitas Katolik Soegijapranata	1.6

V PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1	2010	Cash Transfer Programs: An Institutional Management Lessons from Semarang Central Java Indonesia		Proceeding on International Conference in Management Sciences and Decision Making 2010, Tamkang University, Tamsui, Taiwan
2	2009	Pembangunan DKI Jakarta: Sudut Pandang Teoritis Dan Empiris		Dalam Buku: Kekuatan Lokal sebagai Roh Pembangunan DKI Jakarta: Sumbang Pikir Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Unika Soegijapranata
3	2002	Kemiskinan, Belenggu Struktural yang Tak Terpecahkan		dalam buku, <i>Mengurai Belitan Krisis, Renungan Dari Benda Dhuwur</i> , penerbit Kanisius
4	2011	Strengthening The Domestic Market or Searching Export Opportunities : A Dillema Resulted from The Impact of ACFTA On Micro, Small and Medium Enterprises		Chinese Business Review
5	2011	The Harmonization Of Business Competition Regulation In Asean Economic Community Framework		Proceeding on International Conference in Management Sciences and Decision Making 2011, Tamkang University, Tamsui, Taiwan [with Murti Lestari]

6	2008	Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia, Badai Pasti Berlalu?		Penerbit Kanisius, Yogyakarta, anggota penulis
7	2008	Menjaga Volatilitas Nilai Tukar: Faktor Pendukung Pengembangan Bisnis Di Asean		<i>Jurnal Kinerja</i> , Universitas Atmajaya, Yogyakarta
8	2008	Jeda Struktural dalam Suku Bunga Dan Kurs : Pengaruhnya Terhadap New Keynesian Phillips Curve Di Indonesia		<i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis</i> , UKSW
9	2007	Exchange Rate Volatility and Indonesia-Japan Trade Balance Performance	Vol.15, No.2, November (Penulis 1. Insukindro)	<i>Journal Of International Cooperation Studies</i> ,
10	2007	Inflation Targeting: Mengapa Diperlukan dan Bagaimana Supaya Dapat Bekerja dengan Lebih Baik	Vol 5. No.2,	<i>Buletin Ekonomi, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan</i>
11	2006	Dampak Volatilitas Nilai tukar terhadap Perdagangan Indonesia (Pendekatan ARDL-ECM)	No. 2 Desember 2006, (Bersama Sri Yani K)	<i>Jurnal Ekonomi Indonesia</i>
12	2005	Analisis Permintaan Bahan Pangan Hewani: Pendekatan Error Correction Linear Approximation Almost Ideal Demand System		<i>Jurnal Media Ekonomi</i> , Universitas Trisakti
13	2002	Analisis Pengaruh Kebijakan Ekonomi Makro Terhadap Efisiensi Ekonomi Indonesia (1980.1-1999.4)		<i>Jurnal Kompak</i> , STIE Yogyakarta, September
14	2002	Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Arus Perdagangan Indonesia		buku: <i>Kinerja Perdagangan Luar Negeri Indonesia Pada Masa Krisis : Suatu Kajian Empiris</i> , Komite Penelitian Fakultas


				Ekonomi Universitas Trisakti
15	2002	Sektor Unggulan di DKI Jakarta dan Permasalahannya		<i>Jurnal Manajemen</i> , Unika Soegijapranata, Semarang
16	2002	Public Private Partnership : Suatu Solusi Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Berbasis Kompetensi	Vol 8 No.1,	<i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis</i> , Dian Ekonomi
17	2001	Analisis Fenomena Inflasi Di Indonesia 1980.1-1999.4		Jurnal Kinerja, Program Pasca Sarjana, UAJY, Yogyakarta
18	2001	Struktur Ketenagakerjaan : Cermin Pemberdayaan Perempuan?	Vol: 10 No. 1,	Seri Kajian Ilmiah Unika Soegijapranata, Semarang
19	2001	Stress Kerja Karyawan BPR, Jurnal Ekonomi dan Bisnis		Dian Ekonomi, UKSW, Salatiga

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.

Semarang, 14 April 2013

Pengusul,



Dr. Angelina Ika Rahutami, MSi

LAMPIRAN 5. Format Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Drs. Suhartono, M.Si.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196307231998021001
5	NIDN	0023076301
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarnegara, 23 Juli 1963
7	E-mail	tono@ut.ac.id
8	Nomor Telepon / HP	'081319896154
9	Alamat Kantor	Jl. Cabe Raya - Tangerang Selatan
10	Nomor Telepon / Faks	'021 7490941 ext. 2105/021 7434491
11	Lulusan yang telah dihasilkan	-
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ekonomi Pembangunan 2. Ekonomi Perencanaan 3. Ekonomi Koperasi

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Wijaya Kusuma - Purwokerto	Universitas Jenderal Soedirman - Purwokerto
Bidang Ilmu	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Ilmu Ekonomi
Tahun Masuk – Lulus	Masuk 1983 Lulus 1989	Masuk 2006 Lulus 2009
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Sumbangan Perusahaan Susu Promilk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapat Masyarakat di Ke-camatan Karang Lawas Kabupaten Banyumas	Struktur Ekonomi dan Kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah
Nama Pembimbing/Promotor	1. Dr. Kamio 2. Dra. Nurul Bariroh	1. Prof. Kamio 2. Dra. Endang

A. Karya Ilmiah

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2010	Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Banyumas Tahun 2003-2009)	UT	20
2	2011	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2006-2010	UT	20
3	2011	Analisis Basis Ekonomi (Economic Base)	Mandiri	

		di Provinsi Jawa Barat		
4	2012	Penelitian Bahan Ajar Mata Kuliah Ekonometrika	UT	30

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2012	Khitanan Anak Masal	UT	
2	2011	Penghijauan Situ Gantung	UT	

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Struktur Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah	Jurnal Organisasi dan Manajemen (JOM)	7, No. 2, September 2011

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan/Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Intern	Analisis Basis Ekonomi (Economic Base) di Provinsi Jawa Barat	28 Des 2011/UT
2	Seminar Hasil Penelitian	Evaluasi BA Mata Kuliah Ekonometrika	29 Nov/LPPM UT
3	Seminar Nasional dan Code Papers "Sustainable Competitive Advantage-2"	Peranan BPR dalam Meningkatkan Keberhasilan Sektor UMKM	21 Nov. 2012/FE Unsoed

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 510 Tahun Terakhir

No.	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PUPT

Tangerang Selatan, 9 April 2013
Pengusul



Drs. Suhartono, M.Si